

Dra. Sritimuryati

KERAJAAN SOPPENG DALAM TELLUMPOCCOE

**Editor
Sahajuddin**

PENERBIT
de la macca

Kerajaan Soppeng Dalam Tellumpoccoe

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DRA. SRITIMULYATI

**KERAJAAN SOPPENG
DALAM TELLUMPOCCOE**

**Editor
Sahajuddin**

**Penerbit
De Lamacca**

KERAJAAN SOPPENG DALAM TELLUMPOCCOE

© Dra. Sritimuryati

Penulis

Dra. Sritimuryati

Editor

Sahajuddin

Desain Cover

Welsy .G.Andries, S.Kom

Layout

Riska Pertiwi Rifai

Cetakan I, September 2013

Penerbit

De La Macca

(Anggota IKAPI Sulsel No.007/SSL/03)

Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222

Telp. 0411-2410294 - 0811468957 -08114124721

Email : de.lamacca@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang.
Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis
dari penulis dan Penerbit.

ISSBN: 978-602-263-017-0

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	i
DAFTAR ISI	ii
KERAJAAN SOPPENG	1
A. Berdirinya Kerajaan Soppeng	1
B. Perkembangan Kerajaan Soppeng	16
C. Hubungan Kerajaan Soppeng Dengan Kerajaan Lain	28
KESIMPULAN	53
Lampiran Raja-Raja Kerajaan Soppeng	57
Daftar Pustaka	59

PENGANTAR PENERBIT

De Lamacca, sebagai lembaga penerbitan anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sejak tahun 2000, telah banyak menerbitkan buku-buku kearifan lokal yang ditulis oleh penulis di nusantara, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesempatan ini kami berbangga dapat menerbitkan **Buku SEJARAH SOPPENG**, Penulis Dra. Sritimuryati. Dengan terbitnya buku ini, tak dapat dipungkiri, bahwa telah memperkaya ragam kearifan lokal di provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penerbit de lamacca mengucapkan terimakasih kepada Sritimuryati yang telah mempercayakan penerbitan buku ini. Semoga kepercayaan semacam ini dapat terus terbina hingga di masa-masa datang.

Buku SEJARAH SOPPENG ini sudah berada di tangan pembaca yang budiman, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Goenawan Monoharto

Direktur Penerbit De Lamacca

KERAJAAN SOPPENG

A. Berdirinya Kerajaan Soppeng

Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang yang tersebar dari beberapa kerajaan, baik kerajaan yang dianggap utama dan besar seperti Kerajaan Luwu, Gowa dan Bone yang dikenal dengan sebutan Tellu BoccoE¹. Maupun kerajaan diluar tiga kerajaan utama tadi, seperti Kerajaan Tanete, Soppeng, Bantaeng, kerajaan konfederasi Lima Ajatappareng, kerajaan konfederasi Turatea dan banyak lagi kerajaan- kerajaan lainnya baik yang dianggap besar maupun yang kecil. Dari sekian banyak kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan tersebut dalam proses berdirinya sebagai kerajaan yang utuh dan terintegrasi secara internal dalam kerajaan tersebut selalu dihubungkan secara geneologis pada tokoh yang dianggap hebat dan memiliki kekuatan dan kekuasaan di luar batas kemampuan kekuatan dan kekuasaan manusia. Sehingga banyak orang maupun para sejarawan menyebutnya sebagai konsep mitologis.

Keberadaan kerajaan- kerajaan lokal yang ada di

¹ Tellu boccoE, yakni Kerajaan Gowa, Bone dan Kerajaan Luwu memegang peranan utama dalam peristiwa kesejarahan di Sulawesi Selatan. Peranan ini berlangsung hingga perang melawan kolonialisme asing. Baca dalam Depdikbud, 1981, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang: Proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional, hlm. 2

Sulawesi Selatan pada umumnya selalu diawali dengan mitos-mitos sebagai bentuk pengesahan dan legalitas kerajaan. Memang diakui bahwa sebelum mitos-mitos itu muncul dan menjadi suatu konsep legalitas kerajaan, sebenarnya kerajaan-kerajaan itu telah lama ada dan eksis menurut pemikiran kolektif kelampauan mereka seperti Kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Tanete dan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Mitos itulah yang memunculkan tokoh *To Manurung* yang mewarisi raja-raja berikutnya. Namun yang paling menakjubkan karena kemunculannya selalu bertepatan dengan adanya konflik-konflik internal kerajaan yang bersangkutan, atau ada kejadian luar biasa seperti kelaparan dan lain-lain. Kemudian muncullah seorang tokoh atau lebih, dan tokoh inilah yang dianggap sebagai juru selamat yang membawa keamanan, keselamatan, ketentraman dan kemakmuran kerajaan.

Demikian juga Kerajaan Soppeng dalam proses integrasi awalnya sebagai kerajaan yang utuh, juga mengenal konsep mitologi *To Manurung* sekitar abad XIV. Pada abad XIV itulah dalam sejarah kehidupan suku-suku bangsa di Sulawesi Selatan disebut zaman *To Manurung*. Umumnya dipandang sebagai fase awal dari peletakan prinsip-prinsip pemerintahan dan kehidupan sosio-kultural. Sistem pemerintahan tersebut kemudian menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan. Namun yang terpenting dari zaman ini adalah terbentuknya Kerajaan Soppeng dari bentuk-bentuk *matoa* ke bentuk kerajaan.

Konsepsi orang Bugis pada zaman *To Manurung* itu, senantiasa terkait dengan kepercayaan mereka terhadap alam dan makhluk gaib sehingga *To Manurung* sendiri dihayati sebagai keturunan dewa-dewa dari kahyangan. Dalam hubungan itu, agaknya tidak seorang pun di antara warga penduduk Soppeng yang sanggup menunjukkan secara pasti dimana letaknya negeri atau tempat yang disebut kahyangan. Meskipun demikian, setiap orang umumnya mempunyai pandangan yang sama bahwa kahyangan itu berada di lapisan langit. Cara berfikir tradisional masyarakat manusia pada zaman dahulu kala selalu diliputi oleh suasana magis dan sakral berdasarkan alam supranatural. Dengan demikian, raja-raja dianggap personifikasi dari dewa-dewa kahyangan yang turun dari langit ke bumi guna mengadakan tata tertib, sehingga raja-raja dan keturunannya selalu memperoleh martabat kebangsawanan.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa kemungkinan pada masa itu ada konspirasi politik setiap kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan yang mengenal konsep *To Manurung*. Tetapi terlepas dari itu, ternyata masa itu mampu mengkondisikan beberapa kerajaan lokal di Sulawesi Selatan menjadi kerajaan yang besar dan hebat serta mencapai kejayaan dalam perkembangan berikutnya. Apabila pandangan tersebut di atas ini dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan situasi yang berkembang pada masa lampau di mana masyarakat manusia umumnya masih hidup secara bergerombol, tanpa ada suatu kekuatan hukum yang mengikat orang-perorang dalam tindak geraknya, maka kemunculannya sebagai penguasa

atas kelompok-kelompok individu di berbagai tempat berlangsung pada zamannya.

Berdasarkan isi Lontara daerah Sulawesi Selatan, maka dikenal adanya 3 (tiga) periode kedatangan. (Pertama), turunnya "Tamboro langit" yang disebut pula PatotoE di puncak gunung Latimojong. Asal usul dan masa kedatangannya (Tamboro Langit'), tidak diketahui secara pasti, hanya saja di dalam Lontarak disebutkan bahwa Tamboro langi' (PatotoE) itu berada di Boting-Langi, maksudnya dilapis langit. (Kedua), ialah periode datangnya Batara Guru, putra sulung PatotoE ri Lappa Telleng". Sebagaimana halnya PatotoE, Batara Guru tidak diketahui asal-usul dan waktu kedatangannya. Menurut kisah, istri Batara Guru tersebut bernama We Nyilitimo, *To Manurung* yang menjelma dari laut atau "Toppo'E Busa Empong". Periode (ketiga) ditandai dengan kedatangan *tau*, yakni munculnya tokoh-tokoh lokal di berbagai tempat dalam wilayah Sulawesi Selatan, seperti kerajaan- kerajaan lokal yang telah disebutkan di atas². Tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi raja yang berdaulat dan dipertuan oleh segenap rakyat di daerah atau wilayahnya masing-masing.

² Untuk mengetahui kekosongan pemerintahan masa sebelum kedatangan *To Manurung* diberbagai kerajaan di Sulawesi Selatan telah banyak dibicarakan, walaupun belum ditemukan data- data yang paling akurat tentang kebenaran yang valid akan peristiwa tersebut. Dalam lontara sering disebut bahwa periode masa *To Manurung* terbagi pada tiga fase kedatangan. Namun *To Manurung* yang sering diceritakan pada setiap kerajaan lokal di Sulawesi Selatan selalu ada *To Manurung* fase ketiga yang berlangsung sekitar abad XIV, sehingga dapat di pahami bahwa *To Manurung* fase pertama dan kedua adalah masa- masa sebelum tahun 1300 masehi atau sebelum abad XIV. Baca M. Rafiuddin Nur, 2007, *Lontara'na Soppeng: Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*, Rumah Ide, Makassar, hlm. 18- 20, baca juga Pananrangi Mamid, 1991, *Sejarah Kabupaten Tingkat II Soppeng*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, Makassar, hlm. 36-37

Sama halnya dengan Kerajaan Soppeng, bahwa masyarakat Soppeng telah mengenal beberapa negeri-negeri kecil yang dalam istilah Bugis dalam bentuk *wanua* dan dipimpin oleh seorang *matoa*. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebelum munculnya *To Manurung* di Soppeng sudah ada negeri-negeri yang terbentuk. Ada beberapa pendapat bahwa di Soppeng pada masa itu memiliki negeri sebanyak 60 buah, tetapi pendapat ini tidak banyak dijelaskan seperti apa dan bagaimana 60 negeri ini, termasuk tidak kita temukan penjelasan negeri-negeri apa saja yang dimaksud. Tetapi dengan catatan itulah sampai dapat dikatakan bahwa terbentuknya Kerajaan Soppeng berasal 60 buah negeri yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dengan gelar *matoa*. Lalu para *matoa* mengangkat *To Manurunge* ri Sekkannyili dengan nama La Temmamala sebagai raja pertama yang bergelar datu. Upacara pelantikannya berlangsung dalam sebuah tempat yang bernama Sekkannyili³, kira-kira delapan kilometer di sebelah barat Watang Soppeng Kecamatan Lalabata sekarang.

Kemudian *To Manurung* ini, kawin dengan sepupu sekalnya yang berada di Libureng (GowariE) yang dikenal pula sebagai *To Manurung* ri GowariE dan daerah ini termasuk dalam Kecamatan Mario ri Wawo. Menurut ceritera penduduk asli Soppeng berasal dari dua tempat, yakni

³ Disebutkan bahwa di tanah Soppeng dalam sejarah tercatat bahwa ada dua kelompok kekuasaan yang besar di Soppeng, yaitu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau dan didukung oleh 60 negeri kecil yang disebut *matoa*. Tiga puluh *matoa* berada di Soppeng Riaja dan 30 *matoa* lainnya berada di Soppeng Rialau, baca dalam Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991, *Sejarah Perkembangan pemerintahan departemen Dalam Negeri di Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, hlm. 73

Sewo dan Gattareng. Ketika Mannurungngi di Sekkannyili diangkat sebagai datu (raja) di Soppeng Riaja, beliau menunjuk saudara misannya (sepupu sekali) yang turun (*manurung*) di Libureng, dan atas kesepakatan keenampuluh matoa tersebut, maka misannya itu diangkat sebagai Datu Soppeng Rilau.

Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Sekkannyili kawin dengan *ManurunngE* ri Suppa yang bernama We Mapupu yang kemudian melahirkan La Maracinna yang merupakan datu (raja) kedua di dalam Kerajaan Soppeng. Serta menyebutkan bahwa pengangkatan *To Manurung* ditafsirkan sebagai cara untuk memilih seorang raja sebagai figur pemersatu di antara kelompok-kelompok yang sedang berselisih dalam memperebutkan kekuasaan atau awal adanya raja yang menyusun prinsip-prinsip pemerintahan. Kemunculan *To Manurung* sebagai penguasa berlangsung pada zaman "*sianre bale tauwe*". Dan kenyataan pada masa itu bahwa kehadiran *To Manurung* membawa perubahan dan perkembangan tatanan masyarakat di daerah Soppeng dalam sistem kepemimpinan dan pemerintahan.⁴

Sejak kedatangan *To ManurungE* ri Sekkannyili', masyarakat Soppeng menyepakatinya untuk diangkat menjadi pemimpin tertinggi yang disebut Arung (raja) yang dilakukan secara demokratis yang diwakili oleh ke-60 "*matoa*". Sesuai dengan pengelompokkan orang-orang Soppeng di kala itu, raja Petta ManurunngE ri Sekkannyili' mengangkat seorang raja kedua yaitu Petta ManurunngE ri GoariE/ Libureng yang juga masih keturunan *To Manurung*.

⁴Pananrangi Mamid, *op.cit.*, hlm. 39

Dari pengangkatan itu, lahirlah Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Soppeng Rilau. Antara rakyat dengan *TomanurungE* telah dikukuhkan ikrar dan janji setia yang dikenal dalam masyarakat Soppeng sebagai "*Akkuluadangenna To-SoppengE na DatuE*". Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Soppeng, dikenal istilah "*Sorong Pawo*", maksudnya segala kekuasaan datang dari atas (raja). Tetapi seorang raja tidak bersifat diktator, bahkan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh raja, melainkan mempertimbangkan permufakatan dari *matoa-matoa*.

Disamping sistem kepemimpinan dan pemerintahan, pengaruh *To Manurung* juga terlihat dalam sistem sosial masyarakat Soppeng pada masa pemerintahan Petta ManurungE walaupun masih amat sederhana. Setelah berlangsung perpindahan penduduk dari daerah Gattareng dan Sewo, maka enam puluh kampung melebur menjadi tiga kelompok pemukiman, yaitu Laleng Soppeng, Soppeng Rilau, Soppeng Riaja. Namun tidak banyak informasi kenapa dalam perkembangan berikutnya hanya Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau yang banyak dibicarakan sedangkan kekuasaan Laleng tidak banyak diceritakan. Namun disebutkan bahwa masa sebelum kedatangan *To ManurungE* (di *Sekkannyili'* dan *GoariE*) merupakan masa perselisihan dan perebutan kekuasaan yang dikenal dengan istilah "*Sianre Bale Tauwe*" (hukum rimba). Setelah kedatangan *To-ManurungE*, timbul kesadaran dan semangat kedaerahan dalam bentuk persatuan antara masing-masing kelompok yang meskipun terdiri dari dua wilayah besar dan dipimpin oleh dua raja, tetapi mereka hanya mengenal satu negeri saja yaitu "*Tana*

Soppeng". Hubungan kekerabatan berdasarkan ikatan darah bagi orang Soppeng yang dikenal sebagai "*sompung lolo*", sedangkan hubungan kekerabatan melalui perkawinan disebut "*seyajing*".

Adapun orang-orang yang datang dari Sewo disebut orang Soppeng Riaja, sedangkan mereka yang datang dari Gettareng dan Soppeng Rilau. Demikian terbagi dualah orang Soppeng pada waktu itu, tanpa ada raja sebagai penguasa. Hanya terdapat sebanyak 60 (enampuluh) ketua/ kepala, untuk kedua wilayah/ daerah (Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau) tersebut. Para ketua/ kepala itulah yang mengayomi negeri Soppeng sampai datangnya Paduka Petta ManurungE (yang turun) di Sekkannyili'.

Ketika *matoa* Tingo, Jennang Passe serta segenap *matoa-matoa* wilayah persekutuan Soppeng Riaja mengetahui perihal datangnya seorang *To Manurung* di (daerah) Sekkannyili', segera disampaikannya hal tersebut kepada *matoa* Ujung, *matoa* Botto dan *matoa* Bila, bahwa: Ada *To Manurung* di Sekkannyili'. Perkataan/ saran ketiga *matoa* tersebut ternyata disetujui oleh para Ketua persekutuan Soppeng Riaja, maka disepakatilah untuk mengundang mereka (ketua-ketua daerah persekutuan Soppeng Rilau). Setelah itu pada datanglah ketua-ketua daerah persekutuan Soppeng Rilau, lalu berkatalah para ketua-ketua persekutuan Soppeng Riaja. Setelah itu pergilah keenampuluh ketua tadi menemui *To-manurungE*. Berkatalah *matoa* Ujung, *matoa* Bila dan *matoa* Botto kepada *To Manurung* bahwa kedatangan kami sekalian ini, tidak lain adalah untuk memohonkan rahmatmu. Janganlah hendaknya Paduka

kembali ghaib/ menghilang (ke kayangan) dan Padukalah hendaknya yang menjadi raja kami, maka pimpinlah/ bimbinglah kami kepada keselamatan dan kesejahteraan, ayomilah kami semua dalam menghadapi setiap masalah. Padukalah raja yang berkuasa) atas diri kami dalam segala hal. Kalau pun ada putusan/ pendapat kami, namun paduka tidak berkenan menyetujuinya, maka kami pun tidak akan mempertahankannya lagi⁵”.

Sebaliknya *To-manurungE* ri Sekkannyili’ juga menyampaikan pernyataan bahwa hanya apabila engkau semua tidak mengkhianati diriku, hanya apabila engkau semua tidak menserikatkan daku”. Ternyata pernyataan *To Manurung* tersebut diterima bulat oleh para *matoa* dan ditaati dengan janji sumpa setia kepada *To Manurung*. Maka bersepakatlal antara Paduka Yang Mulia TomanurungE ri Sekkannyili’ dengan keenampuluh *matoa*. Setelah kesepakatan atau sistem kontrak politik tersebut, berkata pula *To ManurungE*, kusampaikan pula kepadamu sekalian bahwa “Ada pula saudara misanku/ sepupu sekali yang turun/ manurunng di Libureng. Lebih baik engkau bermufakat bersatu pendapat, agar kami berdualah yang mencarikan jalan kebaikan untukmu semua. Dia (Manurunng ri Libureng) sebagai raja/ Datu Soppeng Rilau dan Aku datu di Soppeng Riaja. Demikianlah asal muasalnnya sehingga ada dua raja/ datu di tanah Soppeng”.

Kembali kepada masalah perpindahan penduduk dari Sewo dan Gattareng yang telah terjadi sebelum datangnya

⁵ *Ibid*., hlm. 73-74

TomanurunngE, maka penduduk Soppeng pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok utama yang menempati, masing-masing: Soppeng pada bagian timur bagi penduduk yang datang dari wilayah Gattareng dan Soppeng bagian barat bagi penduduk yang datang dari wilayah sewo. Kedua wilayah pemukiman tersebut di atas ini mempunyai daerah-daerah otonom sendiri⁶, yaitu, wilayah Soppeng Riaja meliputi daerah-daerah:

- a. Passepe';
- b. Pising';
- c. Lawunga;
- d. Mattobulu;
- e. Ara;
- f. Lisu;
- g. Lawo;
- h. Madello rilau;
- i. Tinco;
- j. Cenrana ;
- k. Salokaraja ;
- l. Malaka ; dan
- m. Mattoanging.

Sedangkan wilayah Soppeng Rilau meliputi daerah-daerah:

- a. LolloE ;
- b. Kubba ;
- c. Panincong ;
- d. TalagaE riattang salo ;

⁶Pananrangi Hamid, *op. cit.*, hlm. 41-43

- e. Mangkuttu ;
- f. Maccile ;
- g. Watu-Watu ; dan
- h. A' kampeng.

Demikian antara lain pembagian wilayah Soppeng Riaja (timur) dan Soppeng Rilau (barat). Terbaginya wilayah Soppeng menjadi dua kelompok pemukiman seperti itu, tampaknya telah mempengaruhi pula sistem kepemimpinan dan pemerintahan, khusus untuk daera ini selama periode *To Manurung*. Pembahasan di muka telah tampak secara jelas, bahwa sebelum datangnya *To Manurung* di daerah Soppeng telah terjadi kesenjangan pemerintahan dan kevakuman hukum, sedangkan unsur-unsur kepemimpinan yang ada merupakan ketua-ketua kelompok di sebut "*matoa*"; maka semua itu mengalami perubahan pada masa adanya *To Manurung*.

Dalam kaitannya dengan sistem kepemimpinan, dapat dipahami bahwa sejak datangnya *To Manurung* ri Sekkannyili', oleh masyarakat Soppeng segera di sepakati untuk diangkat menjadi pemimpin tertinggi yang disebut Arung (raja). Demikian seluruh kebijaksanaan kepemimpinan masyarakat bukan lagi sistem rimba sebagaimana halnya pada masa lampau, akan tetapi telah dikenal adanya pemimpin negeri untuk seluruh wilayah Soppeng. Pengakuan dan penerimaan masyarakat atas kepemimpinan seorang *To Manurung* untuk seluruh negeri dengan sendirinya akan mengikis habis pertengkatan-pertengkaran yang telah terjadi sebelumnya, antara setiap kelompok yang ada di wilayah tersebut.

Namun sesuai pengelompokkan orang-orang Soppeng

pada waktu itu yang telah terbagi ke dalam dua wilayah terpisah, yaitu Soppeng Riaja, dan Soppeng Rilau maka atas saran dari calon raja (Patta ManurunngE ri Sekkannyili') masyarakat Soppeng melalui wakil-wakilnya lalu mengangkat pula seorang raja yang juga berasal dari keturunan *To Manurung* yang tidak lain adalah Patta ManurunngE ri GoariE/ Libureng. Kedua pemimpin tersebut, yaitu Petta ManurunngE ri Sekkannyili, dan ManurunngE ri GoariE masih terhitung bersaudara misan/ sepupu sekali, sehingga dengan datangnya kedua *To Manurung* itu menjadi raja atas wilayah Soppeng akan berakibat timbulnya dua buah kerajaan kembar. Dalam hubungan itu dapat ditemukan dua peristiwa bersejarah yang erat kaitannya dengan pengangkatan *To Manurung* menjadi raja. Pertama, terjadinya janji setia antara *To Manurung* sebagai calon raja di satu pihak dengan para (keenam puluh) ketua sebagai abdi di lain pihak. Kedua, diletakkannya dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan pemimpin/ raja oleh rakyat dengan sistem perwakilan.

Cerita tentang proses pengangkatan Petta ManurunngE di Sekkannyili, maupun Petta ManurunngE ri GoariE, masing-masing untuk menjadi raja berdaulat di Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau, bahwa antara rakyat dengan *TomanurunngE* telah terjadi prolog berupa ikrar dan janji setia. Ikrar dan janji setia tersebut di kenal dalam masyarakat Soppeng sebagai: "*Akkuluadangenna To-SoppenngE na DatuE*" yang secara tegas menekankan kesetiaan dan ketaatan seluruh rakyat terhadap raja beserta seluruh kebijaksanaannya. Sementara di lain pihak sang *Manurung* menyatakan kesediaan untuk memimpin dan membimbing rakyat kearah keselamatan

dan kesejahteraan. Demikianlah, maka setiap kali diadakan pelantikan atau penobatan seorang raja di daerah Soppeng, senantiasa diawali dengan janji setia dan ikrar dari calon raja bersangkutan.

Selain masalah ikrar dan janji setia, maka pemilihan dan penobatan *To-manurunngE* menjadi raja adalah didasarkan atas mufakat dan kesepakatan seluruh rakyat yang dalam hal itu diwakili oleh keenampuluh *matoa*. Peristiwa tersebut, bagaimana pun juga telah merupakan peletak dasar-dasar pemilihan raja secara demokratis melalui sistem perwakilan. Meskipun demikian tidak pernah seorang raja menjalankan pemerintahan yang bersifat diktaktor, melainkan senantiasa mempertahankan unsur mufakat melalui seluruh wakil rakyat atau dikenal sebagai *matoa*. Demikian sistem pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pemerintah, tidak hanya ditentukan oleh raja secara mutlak, akan tetapi selalu memperhatikan kata sepakat yang datang dari *matoa-matoa* yang ada.

Demikian tampak secara jelas, bahwa pemerintahan secara demokratis di dalam kerajaan Soppeng telah dicanangkan oleh *Petta TomanurunngE* sejak kedatangannya sekitar abad XIV. Merunut sumber yang ada bahwa zaman kerajaan di kawasan daerah Soppeng telah berlangsung selama ratusan tahun, mulai pada saat datangnya *Petta ManurunngE* ri *Sekkannyili* sekitar abad XIV, yaitu kira-kira tahun 1300 sampai kepada pemerintahan Haji Andi Wana selaku Datu yang terakhir pada tahun 1957. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, tahta Kerajaan Soppeng telah dipegang secara bergilir oleh 36 orang datu-datu.

Datu, sebagai gelar bagi setiap individu yang dinobatkan menjadi raja dalam daerah Soppeng. Tahta ini pada dasarnya merupakan jabatan yang diwarisi secara turun-temurun dari raja yang pertama, yaitu Latemmalala yang dikenal sebagai *Petta To ManurunngE* ri Sekkanyili.

Sistem pemerintahan dalam Kerajaan Soppeng yang turun temurun dan selalu memiliki hubungan kekerabatan secara geneologis sangat nampak pada raja-raja yang pernah berkuasa/ bertahta di Kerajaan Soppeng. Dimana, bahwa setiap datu yang telah/ pernah memegang tampuk pemerintahan di Tana Soppeng pada zaman lampau mempunyai ikatan kekerabatan antara satu sama lain, bahkan sekaligus mempunyai ikatan darah dengan *Petta TomanurunngE* itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Raja-raja tersebut memiliki cara-cara tersendiri dalam melaksanakan roda pemerintahannya mulai dari raja pertama yang berdaulat, yaitu *To Manurung* di Sekkanyili sampai raja terakhir Andi Wana. Adapun Sususunan raja-raja Soppeng mulai dari *Petta TomanurunngE* sampai kepada raja yang terakhir, beserta masa pemerintahannya masing-masing dapat dilihat pada daftar lampiran.⁷

Walaupun sistem penguasaan raja di Kerajaan Soppeng yang bersifat turun temurun tidak berarti segala keputusan muncul dari raja sendiri. Namun dalam kenyataannya banyak dibantu oleh para *matoa*. Demikian juga masa pemerintahan setiap raja yang bertahta sangat ditentukan oleh kemampuan

⁷ *Ibid*, hlm. 62-63

seorang raja untuk memberikan kesejahteraan rakyat dan mampu melakukan kerja sama yang baik kepada semua pejabat kerajaan termasuk rakyat. Dari susunan raja- raja Soppeng seperti tercantum pada lampiran tampak secara jelas, bahwa setiap raja atau datu yang telah memegang tampuk pemerintahan dalam Kerajaan Soppeng mempunyai jangka waktu yang tidak seragam. Ada yang memerintah cukup lama dan mencapai jangka waktu puluhan tahun, sementara yang lainnya ada pula yang masa pemerintahannya tidak sampai setahun penuh. Demikian *Petta TomanrunngE* ri Sekkannyili dan Lamba, masing-masing sebagai raja Soppeng I dan III, telah memerintah di kawasan Tana Soppeng selama 50 tahun, sedangkan Datu La Tongeng mau pun La Unru yang merupakan Raja XXVI dan raja XXXI hanya memerintah selama kurang lebih setahun.

Apabila daftar nama-nama raja/datu tersebut pada lampiran jika diperhatikan secara cermat, maka akan tampak pula, bahwa ada dua datu diantaranya yang ternyata memegang tampuk pemerintahan dalam Kerajaan Soppeng untuk dua periode, masing-masing: Datu " La Padasejati MatinroE ri Beula"; dan Datu "Batari Toja MatinroE ri Luwu". La Padasajati, seperti tercantum dalam lintasan sejarah pemerintahan Kerajaan Soppeng setelah dinobatkan menjadi raja, untuk pertamakalinya sebagai raja Soppeng XIX dengan masa pemerintahan meliputi kurun waktu selama 7 tahun, mulai tahun 1714 s/d 1722. Setelah itu, beliau digantikan oleh La Pareppa MatinroE ri Sombaopu sebagai Raja Soppeng yang XX, namun masa pemerintahannya tidak lama, hanya berkisar 1 tahun mulai tahun 1721 s/d 1722 dan selanjutnya, digantikan kembali oleh Padasejati selaku Raja

Soppeng yang XXI dengan masa pemerintahan, antara tahun 1722 – 1727.

Sementara itu Batari Toja dalam periode tahun 1727 s/d tahun 1737 menggantikan La Padasajati untuk menjalankan tampuk pemerintahan Kerajaan Soppeng dengan kedudukan sebagai datu/ raja yang XXII dan selanjutnya beliau digantikan oleh Raja Soppeng yang XXIII, yaitu La Oddang Riu dengan masa pemerintahan meliputi kurun waktu selama 5 tahun, mulai tahun 1737 s/d tahun 1742. Dalam periode selanjutnya, yaitu antara tahun 1742 s/d tahun 1744 tampak pemerintahan kerajaan Soppeng kembali lagi di pegang oleh Batari Toja, sebagai Raja Soppeng yang XXIV.

Berdasarkan penjelasan di atas memperlihatkan bahwa pemerintahan Kerajaan Soppeng dalam sejarah pemerintahan kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Kerajaan Soppeng sebagai salah satu kerajaan yang memiliki andil besar pada masa itu, menunjukkan kebesaran dan kekuatan Kerajaan Soppeng. Maka tidak salah jika daerah Soppeng pada zaman yang silam mencatat sebanyak tiga puluh empat datu/ raja yang pernah memegang tampuk pemerintahan, sedangkan periode pemerintahan itu sendiri secara bertahap meliputi tigapuluh enam kali pergantian pimpinan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu meliputi 657 tahun, mulai dari Pemerintahan raja yang pertama oleh Latammalala Petta ManurunngE ri Sekkannyili (1300) sampai pemerintahan Raja Soppeng yang ketiga puluh enam, yaitu Haji Andi Wana 1940-1957.

B. Perkembangan Kerajaan Soppeng

Perkembangan Kerajaan Soppeng dilihat dari masa

awal muncul dan perjalanan sejarahnya selalu terikat dengan sistem adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian perkembangan itu terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu dan zaman yang hadir dan turut mempengaruhi munculnya pemahaman dan pembaharuan yang hadir kemudian. Hal-hal yang baru ini pula dianggap sebagai pembaharuan dan sebagai wujud perkembangan Kerajaan Soppeng. Banyak hal yang saling bersinggungan dan saling mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia pada masa itu, tetapi tidak serta merta menyatu menjadi satu akulturasi dalam masyarakat. Namun hubungan atau kontak-kontak yang terjadi terseleksi secara alam dalam bentuk kearifan lokal dalam berbagai segmen kehidupan seperti sistem adat istiadat, sistem politik dan pemerintahan, perekonomian dan mata pencaharian hidup serta segmen-segmen kehidupan lainnya.

Namun banyak hal, perkembangan suatu bangsa atau kerajaan selalu diukur berdasarkan munculnya pembaharuan yang luar biasa. Khusus perkembangan Kerajaan Soppeng dan termasuk banyak kerajaan lain di Sulawesi Selatan dalam proses awal perkembangannya dan pembaharuan dalam kerajaannya selalu berpatokan pada munculnya *To Manurung*. *To Manurung* inilah yang dianggap tokoh pembaharu dan peletak dasar perkembangan Kerajaan Soppeng khusus dalam bidang politik pemerintahan. Dasar-dasar kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat di wilayah Kerajaan Soppeng, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu dalam naskah ini, mulai dikenal sejak terjadinya ikrar bersama dan janji setia antara rakyat

Soppeng, di satu pihak dan raja atau Petta To ManurunngE di lain pihak. Ikrar bersama dan janji setia yang lasim disebut "*Akkuluadangenna to SoppengE na-puwatta*", pada hakekatnya adalah sebagai tanda atau titik awal dari suatu sistem penyelenggaraan ketatanegaraan dan kemasyarakatan secara teratur. Meskipun seluruhnya itu masih dalam bentuk yang amat sederhana jika dibandingkan dengan keadaan di zaman modern sekarang ini.

Pembaharuan dan perkembangan Kerajaan Soppeng pada masa itu dianggap sangat luar biasa karena sebelum muncul *To Manurung*, masyarakat Soppeng dalam suasana kacau balau yang saling memangsa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pada masa- masa ini hukum rimbalah yang berlaku, bahwa barang siapa yang kuat maka dia atau merekalah yang berkuasa. Sehingga kedatangan *To Manurung* sebagai juru selamat dalam berbagai hal membuat para matoa yang ada di Soppeng sebagai suatu anugera dari dewata. Pasca kehadiran *To Manurung* di tanah Soppeng terimflikasi dalam sistem kehidupan yang aman, penuh kemakmuran dan kesejahteraan, keteraturan adat yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat. Kemudian perkembangan selanjutnya melalui perubahan yang dianggap luar biasa adalah munculnya agama Islam dan dianut secara umum dan menyeluruh oleh masyarakat sebagai agama resmi kerajaan. Masa sebelum datangnya pengaruh Islam di daerah Soppeng berlangsung cukup lama dan meliputi kurun waktu sekitar 309 tahun. Perkiraan tersebut didasarkan atas peristiwa kedatangan *To Manurung* di wilayah tadi yang terjadi sekitar tahun 1300 sampai kepada zaman kedatangan

Islam dalam tahun 1609, ketika tampuk pimpinan kerajaan Soppeng dipegang oleh raja XIV yaitu "BeowE" (1601-1620).

Pada masa pemerintahan raja Soppeng XIV inilah sebagai pelatak dasar sistem pemerintahan baru dalam Kerajaan Soppeng. Walaupun demikian tidak berarti bahwa sistem- sistem lama ditinggalkan begitu saja, tetapi sistem- sistem lama masih banyak yang dipertahankan dan dipakai dalam kerajaan. Namun yang sangat pasti bahwa dengan adanya agama Islam dan menjadi agama resmi Kerajaan Soppeng. Maka semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kerajaan selalu dikontrol dan diukur baik buruknya setiap langkah dan kebijakan yang akan diambil dan terapkan melalui syariat agama Islam yang menjadi dasar pertimbangan. Selama kurun waktu tersebut di atas, maka Kerajaan Soppeng sebagaimana halnya dengan kerajaan- kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan mengalami satu proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah yang cukup panjang. Berbagai peristiwa sejarah yang telah terjadi di daerah Soppeng sejak kedatangan *Petta To ManurunganE*, sampai kepada masa pemerintahan Datu BeoweE sebagai raja Soppeng XIV.

Dalam lintasan sejarah kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, maka Kerajaan Soppeng pada mula berdirinya diperintah oleh dua orang raja yang berkuasa penuh di wilayah kerajaannya masing-masing yaitu, *Petta TomanurunngE* ri Sekkannyili selaku penguasa tertinggi dalam wilayah Soppeng Riaja; dan *Petta TomanurunngE* ri GoariE selaku penguasa tertinggi di wilayah Kerajaan Soppeng Rilau. Negeri Soppeng tersebut, dengan demikian

menunjukkan ciri-ciri sebuah kerajaan mutlak⁸. Walaupun demikian kerajaan mutlak tersebut tetap berpatokan kepada yang Maha Kuasa. Maka masyarakat orang Soppeng, baik Soppeng Riaja maupun Soppeng Rilau sejak zaman lampau yang telah mengenal sistem pemerintah yang lazim tersebut *sorong pawo*, maksudnya segala keputusan berasal dari atas (raja). Kalau kita memperhatikan sistem *sorong pawo* ini dalam Kerajaan Soppeng dapat dipahami bahwa sistem-sistem lama masih tetap di pertahankan, yaitu adanya keyakinan bahwa apa yang terjadi dan diambil oleh raja sebagai keputusan kerajaan dianggap sebagai keputusan yang baik selalu didasarkan atas pertolongan yang Maha Kuasa. Pandangan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa di atas juga mengalami pergeseran dan perkembangan yang sangat signifikan, yaitu adanya kepercayaan dan keyakinan dari sang Dewata ke Sang Ilahi Allah Swt setelah masuknya agama Islam. Pergeseran dan peralihan ini semakin nampak dalam sikap dan perilaku manusia dalam segala hal, tetapi kepercayaan dan sistem adat dan keyakinan berkaitan dengan *sorong pawo* tetap di pertahankan walaupun tujuan dan wujudnya berbeda.

Dalam posisi yang demikian, catatan yang tercakup di dalam naskah *lontara* menunjukkan adanya susunan pemerintahan Kerajaan Soppeng yang pada dasarnya bersifat aristokrasi dalam arti kata bahwa segala keputusan dasar diambil oleh suatu kelompok elite yang anggotannya sedikit

⁸ Batas pengertian tentang istilah kerajaan mutlak yang dimaksudkan di dalam naskah ini adalah sama dengan rumusan kerajaan mutlak berdasarkan konsepsi pemahaman dan pengertian, bahwa sebuah kerajaan mutlak mempunyai seorang raja sebagai kepala pemerintahan dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa di atas warga-warga negaranya, serta kepada semua cabang pemerintahan harus tunduk.

sekali dan turun temurun. Untuk memahami bahwa dalam perjalanannya Kerajaan Soppeng mengalami perkembangan dan pembaharuan, barangkali tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini kita akan membicarakannya dan memberikan perbandingan sistem- sistem. Perbandingan yang dimaksud dalam kajian ini adalah perbandingan sistem politik pemerintahan sebelum munculnya agama Islam dan sistem pemerintahan setelah Islam masuk di tanah Soppeng. Dimana pada masa sebelum agama Islam masuk dan menjadi pemikiran dan dasar pengambilan keputusan dalam kerajaan di bawah kontrol kelompok elit yang sangat terbatas jumlahnya. Kelompok-kelompok elite, khususnya dalam aktifitas bidang pemerintahan di daerah Soppeng dapat dilihat dalam pandangan yang didasarkan pada aturan- aturan yang ada dan diterapkan dalam kerajaan, seperti adanya kepercayaan dan keyakinan pada *matoa-matoa* yang ada di tanah Soppeng.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa di Kerajaan Soppeng dibangun atas enam puluh *matoa* sebagai negeri-negeri kecil yang tersebar di tanah Soppeng. Walaupun sangat disayangkan karena enam puluh negeri *matoa* yang dimaksud sampai sekarang belum diperoleh data maupun *lontara* yang akurat dan menjelaskan negeri-negeri *matoa* yang dimaksud. Namun yang banyak disebutkan bahwa dari enam puluh negeri *matoa*, ada tiga *matoa* yang selalu dipercaya dan selalu mewakili enam puluh *matoa* lainnya, yaitu *matoa* Botto, *matoa* Ujung, *matoa* Bila yang secara khusus dipercaya dan ditunjuk oleh kelompok *matoa* lainnya dan

bahkan dipercayakan oleh TumanurungE ri Sekkanyili.⁹

Kenyataan tersebut di atas ini menunjukkan, bahwa sebelum dan bahkan sesudah raja yang berasal dari *To Manurung* memegang tahta pemerintahan di daerah Soppeng beranak-pinang. Maka di bawah raja selaku pemegang kekuasaan tertinggi masih terdapat pula kelompok-kelompok elite yang terdiri atas 3 (tiga) orang *matoa* selaku pengambil inisiatif, untuk kemudian disetujui oleh seluruh *matoa-matoa* lainnya yang berjumlah 60 (enam puluh) orang. Demikian struktur pemerintahan tradisional pada periode pertama dari pertumbuhan Soppeng. Struktur pemerintahan Kerajaan Soppeng pada zaman pemerintahan *To Manurung* raja Soppeng didampingi oleh ketiga orang *matoa*, yaitu *matoa* Botto, *matoa* Ujung, dan *matoa* Bila di dalam menjalankan pemerintahan¹⁰. Dalam pada itu, ketiga *matoa* bersangkutan berwenang mengadakan mufakat sesamanya baik dalam hal-hal menyangkut urusan dalam negeri atau pun urusan luar negeri, untuk kemudian di setujui oleh keenam puluh *matoa-matoa* lainnya selaku wakil rakyat.

Struktur pemerintahan kerakyatan Soppeng tersebut di atas berlangsung cukup lama, yaitu sejak pemerintahan *To Manurung* sampai raja IV Kerajaan Soppeng We Tekkawanua, kemudian mengalami perubahan masa pemerintahan raja Soppeng ke-V Lamakkanenna. Perubahan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada

⁹ Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991, *Sejarah Perkembangan pemerintahan departemen Dalam Negeri di Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, hlm. 73, juga pada Pananrangi Hamid, op.cit., hlm. 99

¹⁰ *Ibid.*

masa itu dalam Kerajaan Soppeng. Ketika kedua orang (*To Manurung*) telah beranak-pinang. Maka diadakannlah jabatan *panngepe* dan *pa'duireng* atas dasar kesepakatan datu Botto, Arung Bila serta datu Ujung, baik menyangkut urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Dan tidak ada seorang pun dari sesamanya warga Soppeng dapat membantahnya, karena mereka (ketiganya) dipertuan.

Demikian terjadinya perubahan struktur pemerintahan dalam kerajaan Soppeng, turut mempengaruhi, bahkan dimotifisir oleh semakin berkembangnya keturunan raja-raja, pemegang tampuk pemerintahan. Perubahan dan perkembangan struktur pemerintahan dalam Kerajaan Soppeng tersebut bisa dipahami karena dalam masyarakat telah berkembang dan semakin besarnya perkembangan masyarakat, baik secara kekerabatan, sosial budaya, ekonomi dan sistem mata pencaharian hidup dan lain sebagainya. Apa lagi dalam sistem pemerintahan yang bersifat turun temurun, sehingga dalam perkembangannya yang semakin kompleks dan semakin banyak keturunan raja-raja yang ingin berkuasa semakin ketat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun pada sisi lain sebagai raja yang berkuasa selalu berusaha mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya sebagai raja yang berdaulat sampai kepada anak-anak keturunannya. Dengan dasar inilah yang menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perubahan dan perkembangan baru dalam pemerintahan Kerajaan Soppeng dengan munculnya jabatan *pangepa*¹¹ dalam Kerajaan Soppeng.

¹¹ Jabatan baru dalam kerajaan terkait dengan kepentingan tertentu, dan setelah jabatan baru itu diterapkan ternyata dianggap tepat dan sangat bermanfaat dalam

Dalam pada itu, istilah kata *pangepa* biasanya dipergunakan secara khusus kepada jenis manusia, selaku obyek yang di dalamnya tercakup mengasuh atau pun menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang bersangkutan¹². Demikianlah, konsepsi istilah *pangepa'* di dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, khususnya di wilayah Kerajaan Soppeng mempunyai arti dan makna yang sangat luas, meliputi usaha-usaha dan kegiatan tentang: pemilihara, pengasuh, pengamanan orang-orang bagi keselamatan dan kesejahteraan raja dan kerajaan, di samping negeri dan rakyat secara keseluruhan.

Mengenai asal muasal timbulnya jabatan *pengepa* tersebut dalam Kerajaan Soppeng adalah bermula pada masa pemerintahan raja Soppeng yang V, yaitu La Makkanennga. Pada waktu beliau dinobatkan menjadi raja, untuk menggantikan kedudukan ibu kandungnya atau Raja Soppeng IV We Takkewanuwa selaku pemegang tampuk pemerintahan, maka kakak kandungnya yang bernama Lawadeng mendapatkan amanah untuk turut membantu sang adik (raja yang berdaulat, yaitu La Makkanenga) di dalam menjaga/ membela keselamatan harta benda, keluarga, serta kerajaan dan seluruh negeri Soppeng. Raja yang berdaulat dianggap perlu untuk didampingi agar mempermudah segala urusan kerajaan yang banyak dan

kerajaan. *Pangepa* sebagai jabatan baru dalam kerajaan menjadi sangat penting untuk diuraikan. *Pangepa* dalam pengertian sehari-hari, adalah orang yang dipekerjakannya manggendong (pengendong) dan secara etimologis, merupakan kata jadian dari dua buah kata, yaitu "*pa*" yang berarti orang (yang) dan *epa* yang berarti gendong. Gabungan dari kedua buah kata tersebut, kemudian mengalami perubahan bunyi dari: "*pa*" kemudian ditambah dengan "*epa*" menjadi "*pangepa*"

¹² Panangrangi Hamid, *op. cit.*, hlm. 61

semakin besar. Baik urusan kerajaan yang sifatnya ke dalam maupun urusan kerajaan keluar, yaitu hubungannya dengan kerajaan- kerajaan lain.

Pada masa pemerintahan raja V ini, struktur pemerintahan mengalami perubahan dan perkembangan. Sebelum kekuasaan dan kepemimpinan raja Soppeng V masih mempergunakan sistem- sistem yang diwariskan oleh *To Manurung*, kemudian sedikit demi sedikit mengalami perubahan berdasarkan tuntutan zaman. Sehingga pada masa pemerintahan raja Soppeng V menjadi raja yang berdaulat tetap menjadi puncak pimpinan yang bergelar sebagai datu. Kemudian di bawah datu adalah *pangepa*, kemudian disusul dengan jabatan ketiga. Ada tiga jabatan pemerintahan dalam Kerajaan Soppeng ini dalam struktur pemerintahan tingkat ketiga, yaitu *padanreng*, *pabicara* dan yang ketiga adalah watanglipu. Lalu struktur pemerintahan terakhir sebelum rakyat Soppeng secara keseluruhan adalah para *matoa* enam puluh.

Struktur pemerintahan Kerajaan Soppeng seperti tergambar di atas ini masih mengalami pula perubahan- perubahan pada fase sejarah berikutnya. Pada pembahasan sebelumnya dalam naskah ini telah ditemukan, bahwa sejak mula kedatangan Peta TomanurunngE di daerah Soppeng sampai kepada zaman masuknya pengaruh agama Islam, daerah tersebut telah mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang dan khususnya dalam bidang pemerintahan. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut, bagaimana pun juga telah turut mempengaruhi pula bidang- bidang kehidupan lainnya termasuk bidang politik.

Dalam rangka usaha pembinaan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah Soppeng, khusus pada periode sebelum masuknya Islam, maka pemerintah senantiasa berusaha untuk mengembangkan jaringan hubungan politik, baik secara internal maupun eksternal.

Perubahan dan perkembangan baru kemudian adalah masuk agama Islam. Pasca masuknya Islam di daerah Soppeng sekitar tahun 1609, pada dasarnya tidak semata-mata mempengaruhi perkembangan di bidang keagamaan dan kepercayaan saja. Akan tetapi berbagai fakta sejarah telah menunjukkan peranan dan pengaruh Islam itu sendiri dalam setiap bidang kehidupan, seperti: pemerintahan, politik, sosial dan budaya setempat. Pengaruh Islam dalam bidang pemerintahan, khusus di daerah Soppeng secara jelas tampak pada penambahan komponen dalam struktur pemerintahan kerajaan di daerah Soppeng. Sebelum masuknya pengaruh Islam struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Soppeng terdiri atas: datu sebagai pemegang tampuk pemerintahan tertinggi dalam kerajaan, kemudian dibantu/ didampingi oleh para pejabat-pejabat *Pengepa*, *Pa'bicara* dan *Watang Lipu*, maka hal itu mengalami perubahan, setelah masuknya Islam.

Perubahan yang tampak di bidang struktur pemerintahan setelah masuknya pengaruh Islam, pada dasarnya masih tetap dipegang oleh seorang datu yang merupakan penguasa tertinggi, namun pejabat-pejabat yang membantu/ mendampinginya telah bertambah menjadi lima unsur. Unsur-unsur tersebut, adalah: *Pangepa'*, *Pa'danreng*, *Pa'bicara*, *Watang Lipu* dan *Kali* (Kadi). Dalam posisi yang demikian, *kadi* mempunyai tanggungjawab di bidang

keagamaan dan syariat agama Islam. Bukan hanya itu tetapi peranan kadi dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan semakin kuat karena kadi bukan hanya mengatur urusan keagamaan saja tetapi lebih dari itu kadi memiliki peranan untuk memberi masukan kepada jabatan-jabatan lain dalam Kerajaan Soppeng. Termasuk memberi masukan kepada raja atau datu ketika raja memintanya, khusus berkaitan kebijakan yang akan diambil oleh raja. Hal ini ditempuh karena raja khawatir mengambil kebijaksanaan yang salah sehingga biasanya meminta pendapat kepada pejabat lainnya dan tidak terkecuali kepada kadi. Besarnya peranan dari kadi tersebut dalam Kerajaan Soppeng, mengingat jabatan ini sangat vital terkait dengan pranata-pranata sosial masyarakat yang begitu kuat. Apa lagi telah ada kepercayaan dan keyakinan sebelumnya dan ditaati oleh warga masyarakat.

Pihak kerajaan dengan diadakannya jabatan kadi ini yang mengurus masalah keagamaan menjadi sangat penting sebab jika salah menempatkannya maka taruhannya adalah jabatan kekuasaan raja. Terselenggaranya peranan dan tanggung jawab kadi tersebut, pada dasarnya dimungkinkan oleh karena diterimanya Islam sebagai agama resmi diseluruh wilayah Kerajaan Soppeng, sehingga akan secara langsung menjadi urusan kerajaan dan melembaga dalam kehidupan adat istiadat, sebagai satu kesatuan yang utuh.

Mengenai perkembangan politik dalam negeri di daerah Kerajaan Soppeng pada waktu itu dapat dikatakan telah terpadu secara erat di bawah panji-panji Islam. Sehingga para raja dan kerajaan-kerajaan kecil dalam wilayah tersebut menjadi lebih kukuh dan saling menopang dalam

mempertahankan negeri mereka, terutama dari rongrongan kerajaan-kerajaan lain. Berbagai perubahan di bidang politik luar negeri, khusus sesudah masa Islam dapat dikemukakan dalam dua bentuk. Pertama, hubungan politik luar negeri dalam bentuk persahabatan melalui peristiwa-peristiwa perjanjian politik; dan kedua, pertentangan-pertentangan politik yang tercermin melalui peristiwa peperangan.

C. Hubungan Kerajaan Soppeng Dengan Kerajaan Lain

1. Hubungan Politik Dalam Negeri

Kerajaan Soppeng dalam hubungannya dengan kerajaan lain dilakukan sebagai usaha untuk menciptakan keamanan kawasan sepanjang wilayah perbatasan kerajaan. Hubungan itu pula dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan seperti hubungan dalam bidang perdagangan, politik dan pemerintahan termasuk hubungan dalam sosial budaya untuk menjamin terjalinnya hubungan kekerabatan yang intensif dan saling menguntungkan. Namun dalam Kerajaan Soppeng pada masa awal perkembangannya bukan hanya hubungan keluar yang paling diutamakan tetapi hubungan secara internal yang dianggap paling utama dan terlebih dahulu dilakukan. Makanya Kerajaan Soppeng yang terbagi dalam dua kekuasaan besar yaitu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau berusaha dipersatukan. Sehingga dalam kajian ini barangkali hubungan internal Kerajaan Soppeng yang akan diuraikan terlebih dahulu.

Apalah artinya hubungan keluar kalau dalam negeri sendiri belum berhasil dipersatukan, dan inilah yang menjadi persoalan di Tanah Soppeng. Makanya hubungan politik

dalam negeri yang diselenggarakan secara internal dilakukan secara insentif yang bertujuan untuk tetap menjaga terbinanya kesatuan dan persatuan antara daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan kecil yang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Soppeng sendiri. Sementara di lain pihak, hubungan politik luar negeri yang dikembangkan secara eksternal terhadap berbagai kerajaan lokal lainnya di Sulawesi Selatan, adalah dimaksudkan terutama untuk terbinanya persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan pada kerajaan yang terlibat dalam hubungan tersebut bagi kepentingan negeri masing-masing pihak.

Dalam mencapai persatuan dan kemajuan dalam kerajaan termasuk hubungannya dengan kerajaan lain tidak terlepas dari kepentingan politik. Karena perkembangan, kemajuan dan persatuan yang menjadi tujuan setiap kerajaan, maka kerajaan tersebut senantiasa melakukan hubungan politik, maka Kerajaan Soppeng sebagaimana halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di masa itu. Kecenderungan yang banyak terjadi pada masa itu terkait dengan hubungan politik selalu dilakukan dengan cara-cara tertentu dan secara garis besarnya dikembangkan menjadi 3 cara yaitu: dengan cara kekeluargaan dan perkawinan; diplomasi dan perjanjian politik; serta penaklukan dan peperangan.

Hubungan internal yang perlu diuraikan di sini secara singkat adalah hubungan penyatuan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau walaupun sepiantas lalu telah disinggung di atas. Dimana usaha-usaha yang telah dilakukan dalam penyatuan tanah Soppeng memang tidak gampang seperti

gampangnya membalikkan telapak tangan karena kedua kekuasaan tersebut dalam posisi yang sama. Sehingga untuk menyatukannya di bawah satu kekuasaan mengalami jalan buntu dan bahkan yang terjadi adalah perselisihan dan perlawanan antara satu sama lain. Namun juga, memang banyak kecenderungan yang terjadi bahwa biasanya sebelum terjadi penyatuan yang abadi selalu didahului oleh perbedaan dan bahkan peperangan seperti yang terjadi di Tanah Soppeng, antara Soppeng Riaja dengan Soppeeng Rilau. Terjadinya pertikaian antara Kerajaan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau dalam masa pemerintahan Datu La Mataesso Puang LipuE PatolaE raja Soppeng XI¹³. Latarbelakang terjadinya pertikaian tersebut tidak diketahui secara pasti, namun diceritakan bahwa Kerajaan Soppeng Rilau yang pada saat itu berada di bawah pemeritahan datu La Makkarodda Totenribali merasa kewalahan dan dinyatakan kalah atas kekuatan dan supremasi Soppeng Riaja.

Kekalahan Soppeng Rilau dalam pertikaian tersebut di atas menyebabkan datu La Makkarodda merasa dipermalukan dan penasaran atas kekalahannya, sehingga beliau berangkat ke Tanah Bone untuk mencari bantuan. Secara politik kenyataan itu memang terlihat dan menegangkan serta membahayakan masalah keamanan di tanah Soppeng. Tetapi sisi lain juga memperlihatkan bentuk dan suasana

¹³ Selain pengaruh luar negeri (luar Kerajaan Soppeng) yang menyebabkan terjadinya pertikaian antara Soppeng Riaja dengan Soppeng Rilau, juga karena dalam Kerajaan Soppeng sendiri terjadi persaingan antara dua kekuatan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa dengan adanya pertikaian tersebut dua kekuasaan besar ini di tanah Soppeng menjadi satu kesatuan Kerajaan Soppeng, baca Edward L. Poelinggomang, dkk, 2004, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*, Makassar, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan, hlm. 37-38

lain, dimana pada saat La Makkarodda meninggalkan tanah Soppeng yang membuat raja Soppeng Riaja La Mataesso Puang LipuE PatolaE mengirim utusan. Menyusul serta memberitahukan kepada La Makkarodda agar beliau sudi kembali ke Tanah Soppeng (Mario) dan tetap memegang tampuk pemerintahan kerajaan Soppeng Rilau, sebagaimana layaknya dua orang yang bersaudara kembar. Untuk senantiasa menjaga kesatuan disamping persatuan antara kedua kerajaan bersangkutan secara internal dengan melalui jalur diplomatik. Namun ternyata kemudian, bahwa ajakan dan maksud baik tersebut tidak dihiraukan oleh raja Soppeng Rilau, seperti tercermin dalam jawabannya terhadap utusan raja Soppeng Riaja yang kira-kira berbunyi demikian: *Bessing passuka bessing tepa parewekka*, maksudnya saya keluar dari negeri Soppeng karena tombak, maka saya pun hanya akan kembali kelak dengan tombak pula.¹⁴

Demikian La Makkarodda Totenribali MabbeluaE, tetap melanjutkan usahannya untuk mencari bantuan dari negeri tetangganya yaitu Tanah Bone, akan tetapi setelah mencoba menghubungi beberapa orang raja dan mengemukakan maksudnya tadi, ternyata tidak ada seorang raja pun yang bersedia bersekutu untuk memerangi Soppeng Riaja. Apalagi memberikan bantuan untuk mengadakan penyerangan terhadap Kerajaan Soppeng Riaja. Dalam pada itu, tinggallah La Makarodda beberapa waktu lamanya di negeri Bone dan berhasil memperistrikan We Tenripakkuwa saudara kandung raja Bone yang bernama La Tenrirawe Bongkange.

¹⁴ *Ibid.*

Terjadinya hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Soppeng melalui jalur perkawinan tersebut di atas, turut mempengaruhi situasi politik di dalam Kerajaan Soppeng sendiri maupun politik luar negerinya.

Pengaruh politik luar negeri yang timbul kemudian setelah terjadinya perkawinan antara La Makarodda dengan We Tenripakkuwa seperti tersebut di atas tadi, adalah terbukanya suatu kesempatan dalam rangka ikatan persahabatan, antara Kerajaan Bone di satu pihak dan Kerajaan Soppeng di lain pihak. Beberapa waktu pasca terjadinya perkawinan tersebut, kembali datang utusan Soppeng Riaja untuk meminta raja Soppeng Rilau yang kedua kalinya. Terjadinya perundingan kedua antara Kerajaan Soppeng Riaja dengan Datu La Makkarodda yang pada waktu itu masih berada Kerajaan Bone. Pada waktu itu, raja Soppeng Riaja segera mengirimkan utusannya untuk mengadakan perundingan dengan La Makkarodda di Bone dengan maksud mengajak La Makkarodda, kiranya sudi kembali ke negeri (Soppeng Rilau/ Mario) dan memegang tampuk pemerintahan kerajaan, seperti sediakala. Namun ajakan kedua tersebut tetap ditolak oleh La Makkarodda, dan demi menjaga terjadinya perselisihan dan pertikaian yang akan terulang lagi jika beliau tidak tetap memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Soppeng Rilau, sebagai tetangga dan sebagai saudara kembar Kerajaan Soppeng Riaja.

Berselang beberapa waktu lamanya setelah perundingan kedua di atas, entah alasan apa dan pastinya bagaimana sampai terjadi perundingan yang ketiga kalinya antara La Makkarodda dengan Mataesso Puang LipuE. Perundingan ini berbeda dari

perundingan sebelumnya, karena perundingan yang lalu itu inisiatif timbul dari La Mataesso raja Soppeng Riaja, sementara perundingan yang ketiga ini timbul atas inisiatif La Makkarodda raja Soppeng Rilau. Alasan yang dapat diceritakan pada masa itu adalah pertama, karena adanya kenyataan bahwa tidak ada satu kerajaan dalam wilayah Tana Bone yang bersedia membantu dan bersekutu menggempur Kerajaan Soppeng Riaja. Kedua, karena beliau sendiri sudah merasa kangen terhadap sanak family dan negeri tumpah darahnya, yaitu Tanah Soppeng. Demikianlah beliau kembali ke negeri Soppeng untuk bermukim secara menetap seperti sediakala, namun dalam hal itu beliau tidak lagi berusaha untuk merebut kekuasaan dan tampuk pemerintahan, baik di Soppeng Rilau maupun di Soppeng Riaja. Maka pada saat itu pula, terjadilah penggabungan kedua kerajaan kembar itu, menjadi satu kerajaan tunggal yaitu Kerajaan Soppeng di bawah pemerintahan satu raja, yaitu Datu La Mataesso Puang LipuE PatolaE.

Apabila peristiwa penggabungan kedua kerajaan kembar tersebut di atas dikaji secara cermat, maka jelas akan tampak bahwa hal itu terjadi bukan melalui penaklukan dan peperangan, jaringan diplomasi dan perjanjian politik antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Peristiwa penggabungan kedua kerajaan kembar itu menjadi satu cara diplomatik dan perjanjian politik, sekurang-kurangnya telah menjadi bukti nyata bahwa sistem politik dalam negeri di daerah Soppeng cenderung menggunakan jalur kekeluargaan/ perkawinan, di samping jalur permufakatan/ perjanjian persaudaraan, tidak dengan cara penaklukan melalui peperangan.

2. Hubungan Politik Luar Negeri

Sebagaimana halnya dengan hubungan politik dalam negeri yang telah dijelaskan di muka, maka hubungan politik luar negeri turut pula dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan perkawinan. Para keturunan raja-raja Soppeng yang telah mengadakan hubungan kekeluargaan dan perkawinan dengan keturunan raja-raja di sekitar Sulawesi Selatan. Dalam hubungan itu, maka akan turut membawa pengaruh dalam dua hal pokok. Pertama, turut memperlancar jaringan komunikasi antara kerajaan lokal khusus dalam hubungan kekeluargaan dan perkawinan itu sendiri; dan kedua, turut memperlancar hubungan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan, demi kepentingan kerajaan dan negeri masing-masing. Hubungan komunikasi, antara Kerajaan Soppeng melalui jalur kekeluargaan dan perkawinan, antara lain tercermin, dalam berbagai perjanjian-perjanjian politik yang pernah dilakukan dengan berbagai kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, misalnya saja Bone, Wajo, Luwu. Perjanjian kerjasama dan saling membantu antara kerajaan itu biasanya disebut dengan istilah: *ripasseajingngi Tanae* yang maksudnya persaudaraan antara negeri dengan negeri lainnya.

Sejalan dengan konsepsi masyarakat orang Bugis tentang persaudaraan atau pun perkerabatan yang lazim disebut *passeyajingeng*, maka setiap daerah atau kerajaan yang terikat oleh perjanjian persahabatan/ persaudaraan tadi akan senantiasa membina kerjasama dan kesetiakawanan antara satu sama lain. Demikian tampak di dalam sejarah politik di daerah Sulawesi Selatan pada zaman lampau, bahwa kadangkala satu

negeri mengadakan serangan terhadap negeri lainnya atau pun sebaliknya mempertahankan diri dari serangan negeri lain, tidak dengan kekuatan negerinya semata-mata, melainkan turut membantu oleh pihak-pihak negeri yang telah bersaudara dengannya.

Mengenai hubungan kerjasama antara negeri-negeri yang telah terjalin hubungan kekeluargaan dan perkawinan bagi para keturunan raja-raja bersangkutan, khusus untuk daerah Soppeng dapat dipahami dengan cara menelusuri kembali susunan raja-raja yang pernah menduduki tahta kerajaan di daerah tersebut. Raja-raja Soppeng seperti dalam kenyataannya tidak semuanya terdiri atas putra-putri kelahiran daerah Soppeng sendiri, akan tetapi beberapa di antaranya berasal dari daerah lain, misalnya, La Patau dari Bone serta Batari Toja dari Luwu. Mereka itu hanya berkenan memegang tampuk pemerintahan Soppeng selaku raja berdaulat, adalah karena termasuk anggota kerabat atau pun masih mempunyai pertalian darah dengan cikal bakal raja-raja Soppeng sendiri. Ini sejalan dengan sistem pengangkatan raja yang bersifat pewarisan, atas dasar garis keturunan antar generasi.

Bertolak dari beberapa ilustrasi yang telah dikemukakan di atas, maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa terjadinya ikatan kekeluargaan dan perkawinan antara keturunan raja-raja Soppeng dengan raja-raja di sekitarnya, telah turut memperlancar hubungan politik luar negeri bagi kerajaan. Mengenai hubungan politik luar negeri melalui jalur diplomasi dan perjanjian politik di daerah Soppeng,

khusus dalam periode pemerintahan Petta To ManurungE sampai kepada masuknya pengaruh Islam adalah perjanjian persekutuan TellupccoE antara Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng

Perjanjian TellupoccoE ini lazim disebut *Mallamung PatuE ri Timurung*, terjadi pada zaman pemerintahan Raja Soppeng XI Lamataesso Puwang LipuE. Demikian, perjanjian tersebut terjadi dalam suatu pertemuan antara ketiga kerajaan, yaitu: Bone, Wajo, dan Soppeng. Masing-masing kerajaan tersebut diwakili oleh rajanya tersendiri dan didanpingi oleh seorang penasehat kerajaan, yaitu: Raja Bone La Tenrirawe Bongannge didampingi oleh Kajao Laliddong. Raja Wajo Toudamang didampingi oleh La Mangkace, dan Raja Soppeng La Mataesso Puwang LipuE didampingi oleh Topaccalleppang TotongngE. Menurut catatan bahwa proses terjadinya perjanjian antara ketiga kerajaan tersebut di atas, bermula pada saat mereka saling bertemu di daerah Cenrana, di mana timbul inisiatif dari pihak Kerajaan Bone untuk mempersaudarakan negeri mereka. Inisiatif tersebut, lalu disetujui oleh Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Berdasarkan atas persetujuan itu, mereka pun menetapkan untuk saling bertemu di daerah Timurung (Bone Utara) sekitar tahun 1582¹⁵, dalam rangka realisasi penyelenggaraan perjanjian persaudaraan antara ketiganya.

Demikianlah, maka pada saat yang telah ditentukan

¹⁵ Perjanjian persekutuan TellupoccoE yang dikenal *lamumpatue ri Timurung* (penanaman batu di Timurung) pada tahun 1582 yang bermakna bahwa persekutuan tersebut harus betul-betul kuat dan terjaga seperti tidak mudahnya tercabut batu yang ditanam di tanah. Maka dengan penuh harapan agar persekutuan tersebut kuat seperti kuat batu yang tertanam tersebut, baca Edward. L. Poelinggomang, dkk., *op.cit.*, hlm. 59

bersama berkumpul ketiganya di daerah Timurung, untuk selanjutnya meresmikan persaudaraan negeri-negeri bersangkutan yang disebutnya *MattellumpoccoE* atau *TellupoccoE*. Mengenai isi dan tujuan perjanjian tersebut dapat disimak dalam dialog yang terjadi antara masing-masing wakil kerajaan di dalam pertemuan itu, antara lain sebagai berikut. Dalam dialog tersebut raja Bone tampil pertama berbicara dengan mengatakan bahwa sebaiknya kita mempersaudarakan diri di antara kita tiga negeri (Bone, Wajo dan Soppeng). Sebenarnya permintaan dan harapan dari raja Bone tersebut sempat diragukan oleh raja Wajo yang ikut hadir pada saat itu, dengan mengatakan bahwa "Bagaimanakah gerakan kita bersaudara (trio) dimana Wajo berada di bawah supremasi dari Kerajaan Gowa, sedangkan Kerajaan Bone adalah saudara dari Kerajaan Gowa".

Kemudian pernyataan raja Wajo itu langsung dijawab oleh raja Bone "Aku faham akan ucapanmu itu raja Wajo, namun biarkanlah negeri kita bersaudara tiga, Bone, Wajo dan Soppeng. Biarlah Bone yang bersaudara dengan Gowa. Kalau pun Gowa akan tetap memperbudak/ mempertahankan Wajo maka kita bertiga bergabung untuk memerangnya". Setelah raja Bone berbicara panjang lebar tentang sikapnya dalam persekutuan tersebut, maupun sikapnya terhadap supremasi Kerajaan Gowa terhadap banyak kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk tiga kerajaan yang tergabung dalam persekutuan *TellupoccoE*. Maka raja Wajo dan Soppeng langsung setuju dan itu berarti bahwa perjanjian persekutuan tiga kerajaan tersebut telah terwujud dan ditandai dengan menanam batu ditempat mana mereka bertemu mengadakan perjanjian

persekutuan, yaitu di Timurung sehingga peristiwa itu disebut *Mallamung PatuE ri Timurung*. Itulah kita sepakati bertiga, persaudaraan antara ketiga negeri, Bone, Wajo, dan Soppeng. Satu anak sulung satu anak tengah dan satu anak bungsu. Kita menjadi trio bersaudara tiga. Tiga dalam satu kesatuan yang utuh seia sekata dalam suka dan duka. Ikrar dan janji setia ini hendaknya lestari dan tidak akan menjadi sirna, meskipun bumi dan langit menjadi hancur lebur". Demikian antara lain bunyi perjanjian, antara ketiga kerajaan (Kerajaan Bone, Wajo, Soppeng)¹⁶.

Perjanjian persaudaraan antara ketiga kerajaan yang bersangkutan, mempunyai pengaruh yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan bagi masing-masing kerajaan. Dalam pada itu, adalah terbinanya persaudaraan antara ketiga kerajaan yang secara langsung menjamin terpeliharanya keamanan atau tidak timbulnya lagi gangguan keamanan dari masing-masing pihak di daerah perbatasan tiga kerajaan tersebut, di samping itu telah tercipta satu kekuatan gabungan, yang dengan sendirinya memungkinkan bagi setiap anggota persaudaraan untuk senantiasa mempertahankan diri terhadap serangan kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Hal lain, bahwa penggabungan kekuatan melalui perjanjian persaudaraan tadi mempunyai implikasi khusus bagi pembinaan dan pengembangan stabilitas politik, untuk setiap negeri anggota persekutuan. Demikian juga Kerajaan Wajo yang pada saat itu menjadi daerah taklukan dari Kerajaan Gowa (akibat kekalahan dalam

¹⁶ Pananrangi Hamid, *op. cit.*, hlm. 98-99

perang) maka dengan sendirinya berubahlah dukungan yang memungkinnnya melepaskan diri dari Kerajaan Gowa, sementara di lain pihak Kerajaan Soppeng yang memang paling kecil, baik potensi wilayah maupun kekuatannya secara spontan menjadi lebih kuat, karena memperoleh tambahan wilayah dari kedua negeri saudaranya. Negeri Bone yang pada waktu itu termasuk salah satu dari tiga kerajaan kuat di Sulawesi Selatan bersama Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa yang dikenal dengan TelluboccoE atau tiga kerajaan utama. Bone dengan posisi barunya sebagai anggota *TellupoccoE* akan semakin kuat dan terhindar dari gangguan kedua Kerajaan luwu dan Kerajaan Gowa karena kekuatan Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng semakin besar dan kuat. Malahan dengan adanya perjanjian persaudaraan yang disepakati bersama, maka Bone akan menjadi lebih kukuh apabila kelak terjadi perebutan kekuasaan dengan Luwu dan Gowa.

Seberapa jauh pengaruh dan keuntungan diadakannya perjanjian persahabatan/ persaudaraan antara ketiga kerajaan lokal tadi, terutama di dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan, akan semakin dipertegas dengan dijalinnya hubungan bilateral di antara Kerajaan TellupoccoE, seperti perjanjian politik antara Soppeng dengan Wajo. Perjanjian antara Kerajaan Soppeng dengan Kerajaan Wajo, khusus dalam bidang politik terjadi tidak lama sesudah perjanjian TellumpoccoE. Dalam perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak seia sekata, senasib sepenenderitaan dalam suka dan duka; Tidak saling meronrong kerajaan masing-masing; Perjanjian persaudaraan itu harus dipersaksikan

kepada Sang Hyang Dewata untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa keduanya tidak main-main tetapi serius persaudaraan. Perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Soppeng bukan hanya kepada Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo tetapi juga kepada Kerajaan Luwu. Perjanjian antara Soppeng dengan Luwu, menurut catatan bahwa perjanjian antara Soppeng dengan Luwu berisi tentang pengakuan antara keduanya yang menyebutkan bahwa baginda raja Luwu adalah Ibarat angin dan rakyat Soppeng adalah ibarat tangkai pohon, bila Luwu ke barat Soppeng pun ke barat, bila Luwu ke Timur Soppeng ke Timur.

Demikian antara lain bunyi perjanjian politik antara Luwu dengan Soppeng yang pernah terjadi di zaman sebelum masuknya Islam. (tidak berangka tahun). Setelah mengemukakan beberapa perjanjian politik yang telah terjadi antara kerajaan Soppeng dengan berbagai kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, khusus dalam zaman sebelum datangnya pengaruh Islam, maka jelas bahwa sejak masa yang silam daerah yang bersangkutan telah mengenal hubungan politik luar negeri. Berbagai perjanjian politik yang telah diadakan oleh pemerintah Kerajaan Soppeng di masanya, rata-rata membawa implikasi penting bagi daerah tersebut, baik dalam rangka usaha perluasan wilayah pemerintahan maupun untuk menanggulangi tantangan yang datang dari kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya.

Perjanjian politik yang dilakukan oleh Kerajaan Soppeng pada masa itu dianggap sebagai langkah maju untuk membawa Kerajaan Soppeng kearah lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan. Namun perlu juga dijelaskan

bahwa di samping terjadinya hubungan persahabatan dan persaudaraan, tercatat pula bahwa Kerajaan Soppeng pernah melakukan perselisihan dan peperangan dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Terjadinya perselisihan dan peperangan dengan kerajaan lain, terkadang dimotivasi perbedaan di daerah perbatasan yang mengara pada sistem penaklukan di antara mereka. Usaha-usaha penaklukan, di samping peristiwa peperangan yang pernah terjadi sepanjang sejarah daerah Soppeng seperti pertempuran melawan Lamuru; Pertempuran melawan Kerajaan Ajattappareng; Pertempuran melawan Cenrana; Pertempuran melawan Kerajaan Makassar di Maroangin, di Pare-pare, di Rappang; di Tanete perbatasan antara Tanete dengan Soppeng; Pertempuran melawan kerajaan Wajo, termasuk pertempuran melawan kerajaan Bone.

Pertempuran Kerajaan Soppeng melawan Kerajaan Lamuru terjadi dalam masa pemerintahan Baginda Datu La Mataesso Puwang LipuE PatolaE, yaitu dua tahun setelah terjadinya perjanjian persaudaraan yang lazim disebut *mattellumpoccoE di Timurung*. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung kira-kira selama satu bulan, untuk pada akhirnya berakhir dengan kekalahan Lamuru. Sejak saat itulah Kerajaan Lamuru menjadi federasi dari Kerajaan Soppeng. Satu bulan kemudian setelah ditaklukkannya Lamuru, Kerajaan Soppeng menyerang kerajaan Limae Ajattappareng. Pertempuran berkobar antara kedua belah pihak, namun setelah dua bulan berlalu maka Kerajaan Sidenreng (salah satu dari Lima Ajattappareng) dipecundangi oleh Kerajaan Soppeng.

Pertempuran berikutnya, yaitu penyerangan terhadap negeri Cenrana. Pertempuran ini terjadi dalam masa dua tahun sesudah kekalahan Sidenreng dari Kerajaan Soppeng, sedangkan motivasinya adalah sebagai usaha perebutan kembali wilayah tersebut dari jajahan Kerajaan Luwu. Dalam pertempuran melawan agresi Kerajaan Luwu tersebut, Kerajaan Soppeng bergabung dengan Bone dan Wajo sebagai realisasi perjanjian persaudaraan antara ketiga kerajaan yang telah disepakati bersama di Timurung. Pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan Soppeng bersama dengan kedua kerajaan sekutunya. Terjadinya penaklukan itu menyebabkan negeri Cenrana menjadi wilayah yang dikuasai bersama oleh Tellumpoccoe dengan ketentuan, Bone menguasai daerah pelabuhan, sedangkan Wajo menguasai buminya dan Soppeng menguasai aliran sungainya (Sungai Cenrana)¹⁷.

Apabila ketiga peperangan yang pernah terjadi di zaman pemerintahan datu La Mataesso seperti dikemukakan di atas tadi dikaji secara cermat, akan tampaklah bahwa motivasinya adalah untuk usaha perluasan kekuasaan, sedangkan pertempuran yang terjadi di Cenrana agaknya merupakan usaha kerjasama untuk membela dan merebut kembali sebagian wilayah Kerajaan Wajo dari cengkaraman kekuasaan Luwu, Inipun termasuk salah satu konsekuensi

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Saat Kerajaan Gowa mengirim utusan ke kerajaan persekutuan TellupoccoE untuk memberitahukan tiga kerajaan tersebut untuk menerima agama Islam sebagai agama kerajaan bagi Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng tetapi utusan Kerajaan Gowa tersebut malah diberi sebuah gulungan kapas dan roda pemutar yang secara tradisional melambangkan ejekan terhadap maskulinitas seseorang, baca Edward L. Poelinggomang, 2005, "Sejarah Tanete Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru" pemerintah Kabupaten Barru, hlm. 46

logis dari persaudaraan ketiga negeri bersangkutan.

Dalam proses perjalanan sejarah Soppeng selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan raja Soppeng XIV yang bernama Beowe terjadi pula serentetan pertempuran melawan ekspansi Kerajaan Gowa ke negeri-negeri Bugis. Latar belakang dari semua pertempuran tersebut adalah untuk penyebaran agama Islam di bawah pemerintahan raja Gowa MattinroE riagamana. Pertempuran ini lazim disebut dalam lontara *mususelleng*, maksudnya peperangan untuk penyebaran agama Islam¹⁸. Usaha pertama bagi Kerajaan Gowa pada waktu itu, ialah dengan mengirimkan armada perangnya dan berlabuh di daerah Kerajaan Suppa. Melihat hal itu maka pasukan gabungan orang-orang Bugis dari Soppeng dan Wajo segera mencegat mereka sehingga berkobarlah pertempuran di antara pasukan Kerajaan Gowa dengan orang-orang Bugis yang merupakan pasukan gabungan (dari Kerajaan Wajo dan Soppeng). Menurut riwayat, pertempuran tersebut hanya berlangsung selama tiga hari saja dan berakhir dengan kekalahan pasukan Kerajaan Gowa. Dalam pertempuran itu, raja Gowa Tomamenangan rigamana nyaris terbunuh. Sehingga beliau menarik mundur pasukan perang dan seluruh lasyakarnya, untuk kembali ke Makassar.

Pertempuran berikutnya antara orang Makassar dengan orang-orang Bugis terjadi kemudian, setelah berselang tiga bulan sejak kekalahan Makassar pada pertempuran yang pertama kalinya. Dalam penyerangan kedua kalinya itu, laskar orang Makassar mendarat di daerah Akkotengeng

¹⁹ Pananrangi Hamid, *op., cit.*, hlm. 112

atau di sekitar Maroanging. Dalam jangka waktu tiga hari saja sejak kedatangan pasukan orang-orang Makassar di tempat itu, maka orang-orang Akkotengeng dan orang-orang Kera berbalik membantu pihak kerajaan Makassar. Hal yang sama, kemudian diikuti pula oleh orang-orang Sakkuli. Melihat situasi yang berkembang pada saat itu, raja Wajo segera mengirim utusannya untuk menemui federasi-federasi yang bersangkutan dan mengajak mereka kembali mengingat perjanjian persahabatan yang telah mereka bina bersama sejak dahulu kala. Namun ketiga Daerah federasi tadi tetap saja pada pendirian mereka, untuk bergabung dengan para pasukan perang orang Makassar.¹⁹

Demikianlah, maka setelah berlalu satu bulan kemudian orang-orang Bugis yang terdiri atas gabungan Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng melancarkan serangan kepada kubu pertahanan pasukan orang Makassar di Maroanging. Dalam penyerangan itu daerah Sakkuli dibumi hanguskan oleh pasukan perang orang Bugis, sehingga orang-orang Makassar yang mempertahankan daerah tersebut menjadi porak poranda. Pertempuran itu pun berakhir dengan kekalahan Kerajaan Gowa. Kekalahan Kerajaan Gowa, terutama dalam dua kali pertempuran sebelumnya agaknya tidak menyebabkan mereka menjadi jerah, sehingga setelah berlalu selama satu tahun sejak kekalahan mereka di Akkotengeng/ Maroanging, raja Gowa kembali lagi mengirimkan armada perangnya ke negeri Bugis. Ketika itu, pasukan perang Kerajaan Gowa berlabuh di daerah Pare-pare.

Melihat keadaan itu, maka sekali lagi pasukan

gabungan dari Kerajaan Bone dan Soppeng berusaha untuk menghalangi ekspansi Kerajaan Gowa. Kedua belah pihak (Orang Bugis dan Makassar) terjadi kontak senjata untuk ketiga kalinya dan perang ini dianggap pertempuran yang dahsyat. Namun setelah pertempuran berlangsung selama tiga hari, pasukan perang gabungan Wajo dan Soppeng tidak mampu menanggulangi kekuatan pasukan Kerajaan Gowa sehingga melarikan diri, kembali ke negerinya masing-masing. Pertempuran, dengan demikian dimenangkan oleh pasukan Kerajaan Gowa. Satu bulan kemudian, sesudah kekalahan orang-orang Bugis (Wajo dan Soppeng, Rappang yang merupakan salah satu di antara lima kerajaan Ajattappareng menyatakan diri takluk kepada Kerajaan Gowa. Hal itu lalu disusul secara berturut-turut oleh kerajaan-kerajaan Bulu Cenrana dan Mawa. Demikian raja Gowa, mendirikan sebuah benteng pertahanan di Rappang dan setelah tiga hari kemudian, beliau meninggalkan daerah untuk kembali ke negeri Gowa

Menjelang lima bulan setelah taklukannya Rappang maka pasukan Kerajaan Gowa melanjutkan ekspansinya, lalu menyerang Kerajaan Soppeng. Pada waktu itu pertempuran terjadi di daerah Tanete, berlangsung selama satu bulan, untuk kemudian berakhir dengan kekalahan Kerajaan Soppeng. Sejak kekalahan dalam pertempuran di Tanete, maka praktis seluruh Kerajaan Soppeng berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa. Hal itu dengan sendirinya membuka peluang pihak Kerajaan Gowa untuk menyebar luaskan ajaran Islam di negeri Soppeng pada masa pemerintahan raja Soppeng ke-XIV, kira-kira pada tahun 1609.

Selanjutnya penyerangan Kerajaan Gowa terhadap Wajo dilakukan sekitar satu bulan dari kekalahan Soppeng, di mana Gowa pada waktu itu turut dibantu oleh kerajaan LimaE Ajattappareng serta Kerajaan Soppeng. Penyerangan tersebut berakhir dengan kekalahan Kerajaan Wajo. Setahun kemudian, Kerajaan Gowa atas bantuan seluruh negeri/ kerajaan yang telah ditundukkan menyerang Tana Bone. Sama halnya dengan negeri lain maka negeri Bone pun tidak mampu mempertahankan diri, sehingga peperangan berakhir dengan kekalahan dipihak Bone. Demikian, Kerajaan Gowa pada akhirnya menguasai seluruh tanah Bugis dan dengan demikian pula menjadi pemegang kekuasaan politik di Sulawesi Selatan pada waktu itu.²⁰

Kemudian selama penguasaan Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bugis, Kerajaan Gowa pernah mengambil suatu inisiatif untuk memperbaharui perjanjian persahabatan di bawah panji- panji agama Islam. Seperti perjanjian persahabatan antara Bone, Wajo, Soppeng dan Gowa. Pertemuan ini pada dasarnya diselenggarakan atas usaha raja Gowa dalam tahun 1624, untuk membina persatuan dan kesatuan antara orang-orang Makassar dengan orang-orang Bugis. Dalam catatan disebutkan bahwa "tigabelas tahun kemudian, sesudah ditaklukkanya seluruh wilayah daerah orang-orang Bugis oleh Kerajaan Gowa, raja Gowa mengadakan pertemuan besar-besaran di Mala, pada hari Jumat, malam kedua puluh bulan Jumadil Akhir."²¹

²⁰ Pananrangi Hamid, *op.cit.*, hlm. 130-132

²¹ Dalam pertemuan itu, berkatalah utusan raja Gowa, hanya saja yang amat diharapkan raja Gowa ialah bersatu padunya kita semua sebagaimana layaknya

Penyelenggaraan pertemuan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bugis (TellumpoccoE) yang diadakan di Mala itu, merupakan salah satu usaha dari Kerajaan Gowa yang pada waktu itu memegang pimpinan/ kekuasaan politik diseluruh Sulawesi Selatan, untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada. Motivasi dari pertemuan itu, sesungguhnya mengandung arti dan maksud terutama untuk menghindari terjadinya perpecahan antara orang-orang Bugis dengan orang-orang Makassar setelah mereka sama-sama menerima Islam. Semuanya itu tercermin pada bagian akhir dari perjanjian bahwa mereka hanya diperkenankan mengangkat senjata semata-mata untuk memerangi orang-orang yang merusak agama. Raja Kerajaan Gowa pada waktu itu, dengan demikian berusaha memegang pimpinan/ kekuasaan politik atas wibawa agama Islam di seluruh Jazirah Sulawesi Selatan.

Perjanjian tersebut, pada mulanya diterima secara bulat oleh seluruh kerajaan yang hadir, namun ternyata kemudian dilanggar oleh Kerajaan Bone serta Kerajaan Soppeng, terutama untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan Kerajaan Gowa. Pelanggaran yang dimaksud adalah adanya perjanjian persahabatan dan persekongkolan untuk melawan atas kekuasaan Kerajaan Gowa. Perjanjian persahabatan antara Kerajaan Soppeng dengan Kerajaan Bone terjadi dalam masa pemerintahan Tobala dan Lanteribali,

orang-orang yang berkerabat; Jangan hendaknya kita saling bertikai antara saudara sendiri, saling mengangkat senjata untuk berperang, sebab kalau kamu bertikai/ bermusuhan (antara orang Bugis dan Makassar), maka Gowalah yang akan binasa. Barulah kita mengadakan peperangan (mengangkat senjata) apabila ada orang yang merusak agama.

masing-masing sebagai raja Bone dan raja Soppeng. Perjanjian ini dikenal dengan nama *Pincata Lopie* atau perjanjian ri Atapang, maksudnya "Perjanjian Persaudaraan antara Bone dengan Soppeng di Atapang".

Dalam perjanjian tersebut menceritakan tentang hubungan kekerabatan dan penguasaan dan supremasi Kerajaan Gowa terhadap Bone dan Soppeng, dimana disebutkan bahwa "tujuh belas tahun kemudian, sesudah kekalahannya (Bone) di Passempa, maka Tobala dinobatkan oleh Karaeng Sullewatang di Bone dan Latenribali di Soppeng Riaja. Tobala-lah bersepakat dengan Arung PituE serta orang-orang Bone berkunjung ke Mampu, untuk mengajak Datu Soppeng mempersaudarakan Tanah Soppeng kembali.

Pada pertemuan itu, berkatalah Tobala kepada baginda yang dipertuan di negeri Mampu (yang melahirkan datu Soppeng), maksud kedatangan kami kemari untuk menemui anakda datu Soppeng untuk kata sepakat kami dari Bone yaitu berkeinginan mempersaudarakan negeri Bone dengan negeri Soppeng. Bersatu padu, bergandengan tangan, seiring sejalan, bersiap siaga, antara Bone dengan Soppeng untuk menentang/ menyatakan perang kepada Kerajaan Gowa. Bersama-sama dalam suka dan duka.

Kemudian pernyataan itu dibalas dan dijawab oleh Arung Bila, bahwa apabila orang-orang Bone tidak bakal berhianat (dalam janji) maka baiklah kita berikrar. Terus dijawab kembali oleh Tobala, Arung Moncong, Arung Ujung, Arung Tanete, itulah dipersaksikan oleh sang Hyang Dewata Esa. Jikalau kelak kita berhasil melepaskan diri dari cengkeraman raja Gowa supaya Soppeng bersama Bone

menjadi bebas. Tobala juga berjanji dan bersumpah bahwa jika pihak Bone ternyata mengkhianati ikrar dan janji setia bersama di Atapang, maka biarkanlah tidak memperoleh kebaikan bagi anak keturunan seluruh rakyat/ orang Bone. Dijawab pula Arung Bila, dengarkanlah ucapannku wahai Tobala beserta engkau sekalian orang Bone bahwa itulah yang dipegang erat- erat seluruh negeri Soppeng, yaitu ikrar /janji setia kita, seia sekata yang disepakati bersama di Atapang, untuk menentang raja Gowa tidak saling mengkhianati.

Dalam perjanjian dan ikrar itu, Tobala melanjutkan pembicaraannya bahwa seandainya kelak kita berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa, sehingga bebas lepaslah Bone dan Soppeng, tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi antara sama lain. Bersaudara sama besar, tidak saling menguasai/ mendominasi. Seiring sejalan, sama-sama memiliki wilayah kekuasaan, tidak saling mencarikan kebinasaan, tidak saling menyia-nyiakan, tidak saling merampas hak milik, tidak saling berebutan milik masing-masing. Masing-masing menjalankan adat sendiri, sama-sama meniti di atas aturan yang ada, tidak saling mencari-cari keteledoran, tidak saling menipu, saling membantu dalam mempertahankan kerajaan masing-masing.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka perjanjian persaudaraan/ persahabatan antara dua buah kerajaan, yaitu Bone dan Soppeng yang terjadi di daerah AtapangE mengandung arti dan makna yang amat besar bagi perkembangan sejarah pada kedua kerajaan bersangkutan. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah, bahwa peristiwa terjadinya ikrar persekutuan politik tersebut merupakan

proses awal dari timbulnya pemberontakan Kerajaan Soppeng dan Bone terhadap Kerajaan Gowa selaku pemegang kekuasaan politik di seluruh wilayah seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada masa itu. Perjanjian itu pun ternyata menjadi awal pecahnya hubungan persaudaraan dari kerajaan TellumpoccoE yang pernah diikrarkan bersama pada masa sebelum Islam di daerah Timurung yaitu keluarnya Kerajaan Wajo dari persekutuan TellupoccoE. Bahkan adanya perjanjian antara Soppeng dengan Bone itu telah menyebabkan/ membuka peluang bagi Kerajaan Gowa, untuk menguasai kedua kerajaan tersebut, sehingga dalam perkembangan berikutnya menyebabkan terjadinya ketegangan dan perang antara kedua belah pihak, seperti peperangan yang terjadi di Lamuru.

Peperangan ini terjadi, karena raja Gowa telah mendengar berita tentang adanya usaha dari Kerajaan Bone untuk mempengaruhi dan mengajak Kerajaan Soppeng bersekutu serta mempersatukan kekuatan, dalam rangka usaha bersama untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan Kerajaan Gowa. Demikian raja Gowa segera mengirim laskarnya ke daerah Lamuru, untuk memberi teguran serta peringatan kepada raja Soppeng, namun sebelum kedua belah pihak bertemu tiba-tiba datanglah suruhan raja Bone (Tobala) yang mengajak raja Soppeng untuk menyongsong kedatangan pasukan perang Kerajaan Gowa di Lamuru. Berdasarkan atas perjanjian dan ikrar persaudaraan yang baru saja dibuat antara Kerajaan Soppeng dan Bone di AtapangeE, maka pada waktu itu raja Soppeng pun segera memenuhi ajakan raja Bone tadi. Ketika pasukan

dari Kerajaan Soppeng tiba di wilayah- wilayah Lamuru, maka bendera Kerajaan Soppeng pun (BakkaE) dikibarkan di atas suatu tempat yang strategis. Tidak lama kemudian, datanglah utusan raja Gowa menemui arung Bila dengan membawa peringatan-peringatan.²² Namun seruan dan permintaan dari utusan Kerajaan Gowa ditolak mentah-mentah oleh raja Soppeng yang menyebabkan terjadinya peperangan.

Setelah raja Gowa gagal, untuk mengajak raja Soppeng kembali menyadari sumpah setia mereka yang pernah dibuat (antara Gowa dengan TellumpoccoE) Di Mala, maka pecalah peperangan yang amat seru antara Laskar Kerajaan Soppeng, di satu pihak dan Laskar Kerajaan Gowa di lain pihak. Menurut sumber lontara, pertempuran itu berlangsung dalam keadaan tidak seimbang sehingga panji-panji Kerajaan Soppeng yang disebut *Lapanyannya* direbut oleh pasukan Kerajaan Gowa. Dalam keadaan seperti itu, datanglah Laskar dari Kerajaan Bone yang segera memberi bantuan dan menerjunkan diri ke dalam kancah pertempuran. Kedatangan bantuan tersebut menyebabkan laskar Kerajaan Gowa menjadi kewalahan, namun tiba-tiba saja raja Wajo bersama dengan pasukan perangnya datang memberi bantuan kepada

²² Adapun pernyataan utusan raja Gowa "Kembalilah ke negerimu, nikmatilah makanamu yang lezat dan minumlah airmu yang sejuk. Darahmu tidak akan mengalir/ menetes keluar, kecuali jika tergigit oleh lintah dan engkau takkan meninggal, kecuali jika maut yang mencabutnya, maka kembalilah ke negerimu karena sesungguhnya tidak satupun yang memisahkan. Adapun Tobala sendiri, akan dikejar kemana saja sampai ia tertangkap". Mendengar penyampaian dari utusan raja Gowa tersebut di atas ini, maka raja Soppeng La Tenribali, MatinroE riadatunna menjadi murka dan mengusir sang utusan raja Gowa sambil berkata, memang demikianlah persaudaraan kami dengan Bone. Saling membantu dalam kesulitan termasuk kerja sama dalam menghadapi peperangan dengan pihak manapun juga

Gowa serta menghantam Kerajaan Soppeng. Oleh karena itu, Laskar dari Soppeng terpaksa membagi perhatian untuk memberi perlawanan kepada laskar Kerajaan Wajo yang menyerang dari belakang. Akibatnya, Laskar Kerajaan Soppeng menjadi lemah, sehingga perlawanannya sempat dipatahkan oleh Kerajaan Wajo. Melihat kenyataan tersebut, Baginda Arung Bila bersama sanak keluarganya pergi meninggalkan Soppeng.

Setelah Kerajaan Wajo berhasil mengalahkan Soppeng maka kedua kerajaan gabungan (Wajo dan Gowa) melanjutkan penyerangan dan menyerbu ke Tanah Bone. Pada penyerangan itu, Tobala sebagai pemegang tampuk pemerintahan Kerajaan Bone terbunuh. Demikian peperangan menjadi usai atas kemenangan Kerajaan Gowa yang dibantu oleh Kerajaan Wajo. Kekalahan Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Bone dalam peperangan seperti dikemukakan di atas tadi, tidaklah menyebabkan berakhirnya pertikaian antara pihak-pihak bersangkutan, melainkan hal itu membawa buntut yang sangat panjang, bahkan telah menjadi penyebab utama bagi bangkitnya semangat perlawanan putra-putra Bone dan Soppeng untuk melepaskan negerinya dari cengkeraman kekuasaan Kerajaan Gowa.

Pada masa itulah yang menyebabkan Arung Palakka mengambil suatu inisiatif untuk melarikan diri di istana Kerajaan Gowa bersama rombongannya, tepat pada tanggal 7 Agustus 1660 ketika berlangsung upacara kerajaan di Tallo sehingga para pembesar kerajaan berkumpul semua di sana. Kesempatan itulah yang dipergunakan untuk melarikan diri dan membentuk pasukan serta membuat janji setia di

antara mereka. Namun tidak lama dari pelarian mereka diketahui dan dikejar oleh pasukan Kerajaan Gowa dengan penuh likaliku dan pertempuran yang sangat dahsyat selama pengejarannya dan baru terasa aman setelah sampai di atas kapal VOC di Buton dengan tujuan ke Batavia meminta bantuan VOC untuk menghancurkan supremasi dan penjajahan Kerajaan Gowa. Akumulasi semua itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Makassar 1666- 1669 yang berakhir dengan kemenangan VOC- Bugis (Arung Palakka) atas kekalahan Kerajaan Gowa. Itulah awal kehancuran Kerajaan Gowa dan menjadi awal kebebasan Kerajaan Bone dan Soppeng dari cengkraman Kerajaan Gowa, sekaligus sebagai sejarah babak baru di jazirah Sulawesi

KESIMPULAN

Dari sekian banyak kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan tersebut dalam proses berdirinya sebagai kerajaan yang utuh dan terintegrasi secara internal dalam kerajaan tersebut selalu dihubungkan secara geneologis pada seorang tokoh. Tokoh yang dianggap hebat dan memiliki kekuatan dan kekuasaan diluar batas kemampuan kekuatan dan kekuasaan manusia yang dikenal dengan sebutan *To Manurung* sebagai juru selamat yang membawa keamanan, keselamatan, ketentraman dan kemakmuran kerajaan. Sama halnya dengan Kerajaan Soppeng, masyarakat Soppeng telah mengenal beberapa negeri- negeri kecil yang dipimpin oleh seorang *matoa* sebelum abad XIV. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebelum munculnya *To Manurung* di Soppeng sudah ada negeri- negeri yang terbentuk sebanyak 60 buah. Lalu para *matoa* mengangkat

To Manurunge ri Sekkannyili dengan nama La Temmamala sebagai raja pertama yang bergelar datu.

Sesuai dengan pengelompokkan orang-orang Soppeng di kala itu, raja Petta ManurunngE ri Sekkannyili' mengangkat seorang raja kedua yaitu Petta ManurunngE ri GoariE/ Libureng yang juga masih keturunan *To Manurung*. Dari pengangkatan itu, lahirlah Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Soppeng Rilau. maka Kerajaan Soppeng diperintah oleh dua orang raja yang berkuasa penuh yaitu, Petta TomanurunngE ri Sekkannyili selaku penguasa tertinggi dalam wilayah Soppeng Riaja; dan Petta TomanurunngE ri GoariE selaku penguasa tertinggi di wilayah Kerajaan Soppeng Rilau sekitar abad XIV atau sekitar tahun 1300-an masehi.

Perkembangan berikutnya adalah menyangkut hubungan keluar Kerajaan Soppeng. Tetapi apakah artinya hubungan keluar kalau dalam negeri sendiri belum berhasil dipersatukan, dan inilah yang menjadi persoalan di tanah Soppeng yang pada saat itu terjadi pertikaian antara kerajaan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau dalam masa pemerintahan Datu La Mataesso Puang LipuE PatolaE raja Soppeng Riaja dan La Makkarodda To Tenri Bali sebagai Raja Soppeng Rilau. Kemudian pertikaian itu berakhir melalui proses diplomasi sebanyak tiga kali atas bantuan Kerajaan Bone, sehingga tercapailah integrasi antara Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau menjadi satu kesatuan Kerajaan Soppeng. Makanya hubungan politik dalam negeri yang diselenggarakan secara internal dilakukan secara intesif yang bertujuan untuk tetap menjaga terbinanya kesatuan dan persatuan antara daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan kecil yang masuk ke dalam wilayah Kerajaan

Soppeng sendiri. Sementara di lain pihak, hubungan politik luar negeri dimaksudkan untuk terbinanya persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan pada kerajaan yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Salah satu bukti kuat hubungan luar yang dijalin oleh Kerajaan Soppeng adalah perjanjian persekutuan TellupoccoE. Perjanjian TellupoccoE ini lazim disebut *Mallamung PatuE ri Timurung* sekitar tahun 1582, terjadi pada zaman pemerintahan raja Soppeng XI Lamataesso Puwang LipuE antara ketiga kerajaan, yaitu: Bone, Wajo, dan Soppeng. Masing-masing kerajaan tersebut diwakili oleh rajanya sendiri dan didampingi oleh seorang penasihat kerajaan, dalam rangka realisasi penyelenggaraan perjanjian persaudaraan dan menjaga keutuhan wilayah kerajaan antara ketiganya terutama serangan ekspansi Kerajaan Gowa. Perjanjian persaudaraan antara ketiga kerajaan yang bersangkutan, mempunyai pengaruh yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan bagi masing-masing kerajaan.

Perjanjian politik yang dilakukan oleh Kerajaan Soppeng pada masa itu dianggap sebagai langkah maju untuk membawa Kerajaan Soppeng kearah lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan. Namun perlu juga dipahami bahwa disamping terjadinya hubungan persahabatan dan persaudaraan, tercatat pula bahwa Kerajaan Soppeng pernah melakukan perselisihan dan peperangan dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Terjadinya perselisihan dan peperangan dengan kerajaan lain, terkadang dimotivasi perbedaan di daerah perbatasan yang mengarah pada sistem penaklukan di antara mereka. Usaha-usaha

penaklukan, di samping peristiwa peperangan yang pernah terjadi sepanjang sejarah daerah Soppeng seperti pertempuran melawan Lamuru; pertempuran melawan Kerajaan Ajattapparang; pertempuran melawan Cenrana; pertempuran melawan kerajaan Makassar di Maroangin, di Pare-pare, di Rappang; di Tanete perbatasan antara Tanete dengan Soppeng; pertempuran melawan Kerajaan Wajo, termasuk pertempuran melawan Kerajaan Bone. Namun pertempuran yang paling dahsyat dan paling besar serta melibatkan dunia luar adalah Perang Makassar (1666-1669) sebagai sejarah babak baru jazirah Sulawesi pada masa itu.

LAMPIRAN RAJA-RAJA KERAJAAN SOPPENG

1. La Temmamala	Manurunng Eri Sekkannyili	1300 -1350
2. La Marscinna		
3. Lamba		
4. We Tekkewanua		
5. La Makkanennga		
6. La Makkarella.....		
7. La Pawiseang		
8. La Pasampoi SorompaliE		
9. La Mannusa	Towakkareng, MatinroE ri tanana	1530- 1534
10.La'de	MabolonngE	1534- 1560
11.La Mataesso	Puang LipuE PatolaE	1560 - 1575
12.La Sekkati	MallajanngE ri Asseleng	1575 - 1580
13.La Mappaleppe	PatolaE	1580 - 1601
14. Beowe		1601 - 1620
15. La Tenribali	MatinroE ria' datunna	1620 - 1654
16. We Adang	MatinroE ri Madello	1654 - 1666
17. Tenrisenge	Toesa matinroE ri Salassana	1666 - 1696
18. La Patau	Ranreng Toa, matonroE ri Nagauleng	1696 -1714
19. La Padasejati	MatinroE ri Beula	1714 - 1721
20. La Pareppa	MatinroE ri Sombaopu	1721 - 1722
21. La Padasejati	MantiroE ri Beula	1722 - 1727

22. Batari Toja	MantiroE ri Luwu	1727 - 1737
23. La Oddan Riu	MatinroE ri musuna	1737 - 1742
24. Batari Toja	MatinroE ri Luwu	1742 - 1744
25. La Temassenge	MatinroE ri Mallimongang	1744 - 1746
26. La Tongeng	MatinroE rilona	1746 - 1747
27. Lamappajanci		1747 - 1765
28. La Mappapoleoro		1765 - 1820
29. Tenriawaru		1820 - 1840
30. Tenriampareng	MatinroE ri barugana	1840 - 1849
31. La Unru	MatinroE ritenngana	1849 - 1850
32. La Onrong		1850 - 1858
33. Tolempeng		1858 - 1878
34. Abdul Gani	MatinroE ri PakkasaloE	1878 - 1895
35. Sitti Zainab		1895 - 1940
36. Haji Andi Wana		1940 - 1957 ²³

²³ *Ibid*, hlm. 62-63

DAFTAR PUSTAKA

- Edward L. Poelinggomang, dkk., 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Edward L. Poelinggomang. 2005. "Sejarah Tanete Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru" pemerintah Kabupaten Barru
- Harun Kadir, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan (1945-1950)*, diterbitkan atas kerjasama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin
- Depdikbud. 1981. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang: Proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional
- M. Rafiuddin Nur. 2007. *Lontara'na Soppeng: Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*, Rumah Ide, Makassar
- Pananrangi Mamid. 1991. *Sejarah Kabupaten Tingkat II Soppeng*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, Makassar
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991, *Sejarah Perkembangan pemerintahan departemen Dalam Negeri di Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*

PENERBIT
de la macca

Jl. Borong Raya No. 75 A
Telp. 0411-2410294 - 0811 468 957
Email: gunmonoharto@yahoo.com

**GERBANG KECERDASAN
MENUJU PERADABAN
YANG LEBIH BAIK**

ISBN 978 602 263 018 0

